



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 20 (Dua Puluh)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 13 April 2022  
Waktu : Pukul 10.52 s.d.14.33 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F.P-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Strategi Dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global.  
2. Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).  
3. Progres Capaian Bauran EBT Sebesar 23% Pada Tahun 2025.  
4. Lain-lain.  
Hadir : 38 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F.P-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Dony Maryadi Oekon/F.PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F.P-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. Bambang Haryadi, S.E./F.P-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
5. H. Eddy Soeparno, S.H., S.E./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

8 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Christy Barends, S. T.
5. Adian Yunus Yusak Napitupulu.
6. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
7. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
8. Ribka Tjiptaning Ploretariyati.
9. Novri Ompusunggu.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

4 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. Mukhtarudin.
3. H. Hasnuryadi Sulaiman, S.E, M.A.B.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

5 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto.
2. R. Wulansari.
3. Katherine A. Oendoen.
4. H. Iwan Kurniawan, S.H.
5. H. Nurzahedi, S.E.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
2. Rico Sia.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, L.c, M. Sosio.
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
4. H. Marwan Ja'far.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
3. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M. Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
3. H. Nasril bahar, S.E.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Ir. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)
2. Ir. Ego Syahrial, Ph.D (Sekjen ESDM RI)

**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Mari kita mulai saja Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

*Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi.  
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

*Om Swastiastu.  
Nammo Buddhaya.*  
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI baik yang hadir langsung dalam forum ini atau yang juga yang melalui *virtual*;  
Yang kami hormati pimpinan, tadi juga hadir ini nanti akan hadir Pak Edi Suparno, Pak Bambang dan juga Pak Maman dan juga, lupa satunya siapa? Pak Doni, Pak Doni Oekon;  
Baiklah dan juga yang kami hormati Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan segenap jajarannya serta hadirin sekalian.

Pertama-tama, pasti kita semua bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa bahwa kita semuanya dalam kesempatan ini di karunia nikmat sehat wal'afiat sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral bahwa sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan IV, Tahun Sidang 2021-2022

pada hari ini Komisi DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda :

1. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan I dalam hal ini adalah menyampaikan data berdasarkan satuan 3 per Eselon II pada masing-masing Eselon I.
2. Strategi dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak global.
3. Sistem informasi mineral dan batubara antar Kementerian atau Lembaga atau Simbara.
4. Progres pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dan
5. Kelimanya adalah lain-lain.

Bapak/Ibu sekalian.

Berdasarkan data Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dalam rapat ini adalah berjumlah 27 anggota dari 52 Anggota Komisi VII dan terdiri atas 8 fraksi dari 9 fraksi, dengan demikian kourum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat kerja kali ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah disetujui Bapak, Ibu sekalian?

**(RAPAT : SETUJU)**

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.52 WIB)**

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Sebelum rapat ini kami minta kan, kita mulai, kami menyatakan persetujuan terlebih dahulu bahwa rapat ini selesai pada pukul kurang lebih 13.00 WIB atau 2 jam sejak dimulai rapat ini, setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah, sebelum lanjutkan rapat, kami beritakan kepada penambahan bahwa adanya penambahan fraksi anggota dari Fraksi Partai Demokrat yang hadir hari ini Pak Hendrik Sitompul dari Dapil I Sumatera Utara Pak Menteri, ya? Ganteng beliaunya, khas betul Sumatera Utara, kan gitu? Kalau Jawa kayak kita-kitakan agak kecil-kecil gitu. Inilah tapi besar tekadnya, penting juga itu? Penting itu, iya?

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Bahwa pandemi Covid-19 saat ini sudah lebih membaik dan diharapkan kondisi perekonomian negara kita juga dapat lebih baik dari waktu ke waktu. Salah satu yang dapat kita lihat adalah bahwa penyerapan anggaran pemerintah untuk berbagai kegiatan program strategis khususnya yang terkait langsung dengan masyarakat itu semakin membaik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI ingin melihat progres realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Kementerian ESDM Republik Indonesia pada triwulan pertama guna melihat efektivitas realisasi dari pada DIPA tersebut, kok kalimatnya pakai daripada ini, daripada.

Baiklah, selain itu Komisi VII DPR RI juga ingin mendalami strategi dari Menteri ESDM Republik Indonesia dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak global. Seperti kita ketahui bersama, salah satunya disebabkan oleh Agresi Militer Rusia ke Ukraina.

Selanjutnya, beberapa waktu lalu pemerintah telah menertibkan sistem informasi mineral dan batubara antar kementerian lembaga yang disebut dengan Simbara, disingkat Simbara. Disebutkan bahwa sistem ini bertujuan untuk menciptakan tata niaga minerba yang semakin transparan, akuntabel, dan akurat, yang dapat memberikan kepastian bagi penerimaan negara dan juga kepastian bagi pelaku dunia usaha dan sebagainya. Komisi VII DPR RI ingin mengetahui bagaimana sistem operasi Simbara tersebut dan pelaksanaannya sampai sejauh ini.

Bapak/Ibu sekalian.

Pada rapat ini juga Komisi VII DPR RI ingin mengetahui progres per April 2022 ini dari target pencapaian bauran energi baru terbarukan yang telah dicanangkan pemerintah yaitu sebesar 23% pada tahun 2025 dan selanjutnya untuk efektifnya waktu, kami persilahkan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk menyampaikan pemaparannya dan dipersilakan Pak Menteri.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Terima kasih, Bapak Ketua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII,  
Para pejabat Kementerian ESDM, BPH Migas,  
SKK Migas dan BPMA,  
Direktur Utama PT Pertamina,  
Direktur Utama PT PLN, serta hadirin sekalian yang hadir dan sehat  
berbahagia.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji Syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama berkumpul untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda yang tadi disampaikan yaitu;

1. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 triwulan I.
2. Kemudian yang kedua strategi Kementerian ESDM dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak global.
3. Kemudian sistem informasi mineral dan batubara antar kementerian lembaga atau Simbara.
4. Serta keempat; progress capaian bauran EBT di tahun 2025 yang disasarkan 23% serta adanya agenda lain-lain.

Baik, kami sampaikan mengenai *item* pertama yaitu realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 untuk triwulan I, sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, anggaran operasional setiap unit utama telah ditekan sehingga anggaran 5,9 triliun didistribusikan dengan postur sebagai berikut.

Pertama, belanja pegawai sebesar 914,9 miliar atau 15,5%, belanja barang 55,6%, belanja modal sebesar 28,9%. Kemudian sumber rupiah murni sebesar 4,9 triliun yaitu 83%, kemudian adanya pendapatan negara bukan pajak (PNPB) sebesar 9,2% atau 544 miliar. Kemudian BLU sebesar 457 miliar atau 7,8% dan adanya hibah luar negeri sebesar 4,7 miliar atau 0,1%.

Dilihat dari pemanfaatan anggaran, alokasi terbesar ini ditujukan untuk mendukung kegiatan infrastruktur dan survei dengan nilai sebesar 2,97 atau 49,1%. Selanjutnya untuk kegiatan operasional dan pelayanan internal sebesar 2,1 triliun atau 35,2% dan publik nonfisik sebesar 925 miliar atau 15,7%.

Anggaran cukup besar dialokasikan pada kegiatan infrastruktur dan survei sumber daya alam karena ini memiliki dampak langsung kepada masyarakat yaitu antara lain melalui program Jargas, konkrit nelayan, konkrit petani, PJUTS, revitalisasi EBT, alat penyalur daya listrik atau APDAL, bantuan pasang listrik baru, bantuan pasang baru listrik, PLTS atap, PLTMH, pos pengamatan gunung api, sistem mitigasi bencana geologi dan pusat informasi geologi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan juga kegiatan publik nonfisik antara lain pelayanan publik, Badan Layanan Umum, pembinaan dan pengawasan, Badan Usaha dan kelancaran distribusi bahan bakar, penyiapan desiminasi dan monev implementasi kebijakan dan regulasi, pengelolaan data, identifikasi dan pemetaan sumber daya alam.

Sedangkan untuk memperkuat kerja mesin organisasi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diperlukan kegiatan pelayanan internal kementerian lembaga antara lain gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor serta penguatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia serta dilakukannya pengawasan internal.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I per 31 Maret 2022 sebesar Rp456,9 miliar atau 7,74%, ini surplus sebesar 11,8 miliar atau 0,2% dari target triwulan I yang sebesar 445,1 miliar atau 7,54 %. Pada akhir Desember 2022 diharapkan realisasi dapat mencapai 5,67 triliun atau target kita 95,94%.

Selanjutnya, kami sampaikan progres kegiatan infrastruktur tahun 2022 sampai dengan per 31 Maret 2022 antara lain bidang migas, pipa transmisi tahap I, ruas Cirebon-Semarang saat ini dalam finalisasi proses tender dan target tanda tangan kontrak pada 17 Mei 2022. Kemudian jaringan gas 40.777 sambungan rumah di 12 kabupaten kota, 3 paket sudah kontrak, satu paket proses tanda tangan kontrak dengan target tanda tangan tanggal 6 April telah dilakukan, kemudian satu paket progres tender dengan target tanda tangan kontrak di tanggal 29 April 2022. Konkrit nelayan sebesar 30.000 paket di 15 provinsi masih dalam proses penetapan penugasan, kemudian konkrit petani 30.000 paket di 16 provinsi juga masih dalam proses penetapan penugasan. Untuk itu agar pelaksanaan kegiatan konkrit untuk nelayan dan petani dapat kita segera jalankan, kami minta agar adanya dukungan dalam penyediaan data lokasi penerima konkrit sesuai wilayah, wilayah yang di sasarkan.

Kemudian dibidang EBTKI dan ketenagalistrikan PLTS atap 3,8 mwp untuk 108 unit di 33 provinsi, satu paket sudah kontrak, satu paket dalam proses *automatic adjustment*. Kemudian PJUTS 22.000 paket di 28 provinsi, 2 paket dalam pekerjaan tahun kedua dan 2 paket proses kontrak dengan target kontak 12 April, ini sudah di lakukan di tandatangani kontrak nya. Kemudian 3 unit PLTMH di 2 provinsi, 2 unit sudah kontrak dan 1 unit masih dalam proses kontrak dengan target 14 April 2022 besok.

Kemudian APDAL ada 11.347 paket di 2 provinsi telah berjalan dan masuk dalam pekerjaan pada tahun kedua. Kemudian revitalisasi PLTEBT 8 unit di 5 provinsi, ini dilakukan secara swakelola. Kemudian bantuan pasang baru listrik untuk 80.000 rumah tangga di 22 provinsi Kepmen penugasan telah selesai, tanda tangan kontrak tahap 1 dengan PT PLN dilakukan pada minggu kedua bulan Mei 2022. Sedangkan tender akan dilakukan oleh PLN dengan jadwal, tahap 1 sebanyak 40.000, sebanyak 40.000 RT dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei 2022 dan tahap 2 40.000 RT rumah tangga pada semester kedua. Agar pelaksanaan pemberian bantuan pasang baru listrik dapat segera berjalan, sesuai dengan yang direncanakan kami juga mohon dukungan agar dapat dilengkapinya data lokasi bantuan pasang baru listrik sesuai wilayah yang disasarkan.

Kemudian terkait permintaan atas detail pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 per unit Eselon 2 berdasarkan satuan dua yang saat ini ini dikenal dengan nama klasifikasi rincian *output* akan kami sampaikan secara terpisah kemudian.

Kemudian, isu selanjutnya terkait dalam langkah-langkah yang akan kita siapkan untuk menghadapi dampak kenaikan harga minyak global, adanya situasi global politik telah menyebabkan harga minyak global mengalami kenaikan di mana rata-rata realisasi ICP sampai dengan Maret tahun 2022 mencapai 98,42 US dolar per barel. Angka ICP ini jauh di atas asumsi APBN

yang hanya mengasumsikan sebesar 63 US dolar per barel. Adapun rata-rata CP Aramco untuk, untuk LPG telah mencapai 839,6 US dolar per metrik ton di mana asumsi awal kita di tahun 2022 hanya sebesar 569 US dolar per metrik ton.

Beberapa langkah-langkah strategi dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang akan kami lakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain:

Pertama, menjaga ketersediaan pasokan BBM, dalam jangka pendek menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri, kita lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU dan itu juga kami mengusulkan perubahan kuota jenis BBM tertentu yaitu JBT minyak solar, JBT minyak tanah dan jenis BBM khusus penugasan JBKP Peralite serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi sesuai ekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, kita akan melakukan pengamanan yaitu dengan peningkatan cadangan operasional menjadi 30 hari yang sangat ini dari 21 hari dan manajemen stok secara jangka panjang, optimalisasi campuran, bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga Peralite, minyak solar dan mempercepat bahan bakar pengganti antara lain KLBB bahan bakar gas bioetanol maupun kompres natural gas.

Kemudian di sektor hulu migas dalam jangka pendek, ini melaksanakan program *drilling* secara tepat waktu dan sesuai dengan anggaran ada 790 sumber pengembangan kemudian ada kerja ulang sejumlah 581 sumur dan perawatan sumur yang sejumlah 29.582 sumur.

Kemudian pelaksanaan intensifikasi kegiatan yang berdampak langsung kepada kenaikan produksi antara lain reaktivasi daripada *idol well*, menjaga keandalan fasilitas produksi dan mensasarkan target kenaikan 24.000 barrel *oil* kubik.

Kemudian mengatur ulang jadwal pemeliharaan fasilitas dengan target sasaran sebesar 1.550 barrel *oil* kubik serta menurunkan tingkat...*(suara tidak jelas)*...*shutdown* dari 0,68% menjadi 0,5%. Dalam jangka menengah dan panjang dilakukan pengoptimalan produksi *assets existing*, mempertahankan tingkat produksi *existing*, transformasi dari *contingent reserve* menjadi produksi, mempercepat transformasi *contingent resources* menjadi produksi, mempercepat pelaksanaan proyek *chemical enhanced oil recovery*, mendorong eksplorasi yang agresif untuk penemuan besar, percepatan monetisasi gas yang masih *stranded* dan lapangan migas yang tertunda, total *reserve* diperkirakan ada 72,7 mmo dan 3,1 TCV.

Kemudian percepatan penawaran wilayah kerja serta penerapan KSO baru untuk memproduksi kembali *ideal fluid* dengan penawaran dan *time condition* yang lebih baik. Kemudian untuk menjaga ketersediaan pasokan elpiji dan mengurangi impor, dalam jangka pendek akan dilakukan peningkatan

pengawasan, pendistribusian LPG 3 kilo tepat sasaran, bekerjasama dengan Pemda dan aparat penegak hukum kemudian uji coba penjualan dengan aplikasi MyPertamina untuk 34 kabupaten dan kota di 2022 dan penyesuaian formula LPG 3 kg.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang melakukan substitusi dengan kompor induksi, jaringan gas, kita harapkan bisa 1 juta rumah tangga per tahun, kemudian subsidi komoditas menjadi subsidi langsung ke penggunaan, substitusi dengan DME untuk jangka panjang untuk mengurangi satu juta matrik ton LPG di tahun 2027 dan penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi serta percepatan program biogas.

Kemudian juga kita lakukan penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan. Dalam jangka pendek rencana penerapan tarif adjustment tahun 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi sebesar, sebesar 7 sampai 16 triliun, efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer dari PLN.

Dilakukan optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik yaitu dari PLTU dan sumber dari PLTEBT. Dilakukan percepatan pembangunan PLTS atap targetnya 450 megawatt di tahun 2022. Pembangunan pembangkit EBT dari APBN antara lain PLTS atap, PLTMH, APDAL dan lain-lain serta peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.

Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang dilakukan pemadanan dan pemilihan data pelanggan penerima manfaat berdasarkan DTKS untuk subsidi langsung, pengurangan pembangkit BBM menjadi PLT Gas sebesar 598 megawatt dan PLTEBT 500 megawatt di tahun 2025 serta koneksi ke jaringan 1.070 megawatt. Percepatan tambahan kapasitas PLTH, PLTN, PLTMH sebesar 10,93 gigawatt sampai dengan tahun 2030 sesuai dengan RUPTL kemudian percepatan pembangunan PLTS atap di tahun 2023 900 megawatt, 2024 1.800 megawatt dan 2025 3.600 megawatt.

Percepatan pemanfaatan hidrogen sebagai sumber bahan bakar untuk transportasi untuk industri berat dan pembangkitan serta konversi BBM ke listrik dilaksanakan di masyarakat, kita sudah memulai, menkonversi tahun ini 1.000 unit sepeda motor BBM untuk dikonversi menjadi sepeda motor listrik.

Kemudian memperhatikan terjadinya pemulihan ekonomi yang lebih cepat pasca pandemi yang telah memicu peningkatan konsumsi BBM serta adanya disparitas harga BBM menyebabkan peralihan penggunaan BBM di masyarakat, ini berdampak terhadap kuota jenis BBM tertentu antara lain minyak tanah dan minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan Peralite yang diprediksikan pada akhir tahun 2022 melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2022.

Kita ambil contoh kemarin dengan kenaikan pertamax ternyata di lapangan ya terjadi penurunan konsumsi pertamax dan di lain sisi terjadi kenaikan konsumsi pertalite, nah ini harus kita lakukan langkah antisipasi ya

karena juga kita sudah menyiapkan stok yang cukup sebetulnya untuk pertalite, iya dengan konsumsi yang kita perkirakan tidak ada *safeting* dari pertamax ke pertalite.

Kemudian realisasi JBT Solar Januari Maret 2022 telah over quota 9,5 % dan realisasi JBKP pertalite januari-maret 2022 over kuota 14% sedangkan penambahan volume kuota JBT minyak tanah tahun 2022 adalah dengan mempertimbangkan adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur sebesar 10,09% di triwulan IV, tahun 2021.

Untuk itu kami mengusulkan perubahan kuota JBT dan JBKP dalam APBN 2022 sebagai berikut; pertama, pertalite menambah kuota sebesar 5,45 juta kiloliter sehingga dari semula 23,05 juta kiloliter menjadi 28,5 juta kiloliter. Kemudian kedua, solar menambah kuota sebesar 2,29 juta kiloliter sehingga dari semula sebesar 15,1 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter.

Dan ketiga, minyak tanah menambah kuota menjadi tambah kuota sebesar 0,1 juta kiloliter sehingga dari semula sebesar 0,48 juta kiloliter menjadi 0,58 juta kiloliter. Adapun untuk kuota elpiji tabung 3 kilogram tetap yaitu 8 juta matrik ton.

Kemudian kita, saya sampaikan, item selanjutnya mengenai Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar kementerian lembaga atau disingkat Simbara. Sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam mengurangi dan memperbaiki ketidaksinkronan data serta tata kelola sumber daya alam dan memperhatikan hasil kajian KPK yang menyatakan bahwa adanya perbedaan data sumber daya alam dari hulu ke hilir itu dibentuklah sistem informasi minerba antara kementerian lembaga atau Simbara dan dengan adanya Simbara diharapkan data sistem pengelolaan batubara mulai dari hulu sampai hilir terintegrasi sehingga data minerba menjadi tunggal atau sama di mana saja dan akurat untuk meyakinkan bahwa penerimaan negara telah dipenuhi.

Simbara telah di *launching* pada tanggal 8 Maret 2022 sebagai hasil kolaborasi Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia yang didukung dan disupervisi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta KPK. Sinergi ini diharapkan akan menjawab kebutuhan pada era digitalisasi melalui suatu ekosistem yang terintegrasi antara sistem kementerian lembaga terkait, pengelolaan dan pengawasan minerba.

Sebelum adanya Simbara, Sistem dan Data antar Kementerian lembaga selama ini belum terhubung atau terintegrasi dari hulu ke hilir, masih terdapat perbedaan data antara kementerian dan lembaga sehingga dapat memunculkan potensi kehilangan penerimaan negara dari transaksi penjualan minerba, sebagai contoh ditemukannya kode *billing* NTPN sebagai bukti pembayaran PNPB yang digunakan berulang-ulang untuk transaksi yang berbeda melalui Simbara, data dari hulu ke hilir akan terhubung menjadi satu data nasional yang mampu memberikan konfirmasi validitas transaksi minerba melalui data-data konfirmasi status wajib pajak, nomor transaksi penerimaan

negara RKAB, laporan hasil verifikasi sebagai basis data penjualan dan pembayaran yang langsung terhubung ke sistem NISW. Dengan demikian, bukti bayar PNPB hanya dapat digunakan untuk satu kali transaksi saja, apabila terdapat data pada salah satu sistem yang di anggap tidak valid maka Simbara secara otomatis akan membatalkan transaksi penjualan minerba. Saat ini Simbara sudah berfungsi dan Sistem Minerba telah mengirimkan 54 elemen data setiap transaksi penjualan ke Sistem Simbara.

Kemudian isu yang terkait dengan bauran, energi baru terbarukan dengan target 23% pada tahun 2025. Slide 18, capaian baruan energi primer di tahun 2021 adalah 11,7%, guna mencapai target EBT 23% pada tahun 2025 upaya percepatan pemenuhan target bauran EBT dilakukan antara lain dengan melalui pelaksanaan PLTS atap yang kita targetkan 3,6 gigawatt yang berpotensi meningkatkan bauran EBT sebesar 0,8%. Kemudian pembangunan pembangkit-pembangkit EBT sebesar 10,6 gigawatt termasuk penggantian PLTD ke pembangkit EBT akan mampu meningkatkan bauran EBT sebesar 11,7% dan adanya juga biofuel sebesar 11,6 juta kiloliter berpotensi meningkatkan bauran sebesar 4%. Untuk mencapai target EBT diperlukan beberapa syarat agar pelaksanaan program pengembangan EBT dapat berjalan baik yang memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk dari Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI antara lain yang sekarang kita tunggu adalah penetapan Perpres pembelian listrik energi terbarukan, penerapan Permen ESDM untuk PLTS atap serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk Industri EBT.

Sedangkan beberapa program yang sedang dilaksanakan antara lain; pembangunan PLT EBT On Grid yang berbasis pada RUPTL termasuk PLTS terapung, target 2025 18,5 gigawatt, kemudian implementasi PLTS atap target 2025 3,61 gigawatt, konversi PLTD ke PLT EBT target 2025 500 megawatt, kemudian *retailment* dari pada PLTU dengan target tidak ada juga pembangunan PLTU baru mulai tahun 2026, elektifikasi pada kendaraan dan peralatan rumah tangga target 2025 ada 400.000 mobil dan 1,7 juta motor kemudian kompor induksi untuk 8,2 juta rumah tangga, serta pajak karbon dan perdagangan karbon target tahun 2025 implementasi perdagangan karbon dapat dilakukan secara penuh.

Kemudian capaian pengembangan pembangkit EBT sampai dengan triwulan I 2022 adalah 11,63 gigawatt atau sedang mengalami penambahan kapasitas sebesar 1,73 gigawatt sejak tahun 2018. Pada tahun 2022 direncanakan total kapasitas terpasang pembangkit EBT dapat mencapai 12,5 gigawatt dan pada tahun 2025 mampu mencapai kapasitas 25,2 gigawatt sedangkan capaian pemanfaatan mandatory biodiesel pada triwulan I 2022 adalah sebesar 2,5 juta kiloliter dari rencana hingga akhir tahun sebesar 10,1 juta kiloliter. Pada tahun 2021 pelaksanaan program mandatory biodiesel B30 telah mampu menghemat devisa sebesar Rp66 triliun, pada periode 2023-2025 diharapkan pemanfaatan mandatory biodiesel B30 dapat mencapai antara 10 sampai 11,6 juta kiloliter.

Untuk mencapai target 23% EBT, bauran energi pembangkit di tahun 2025 sesuai RUPTL PLN 2021-2030 telah direncanakan penambahan

kapasitas pembangkit EBT sebesar 10,6 gigawatt pada periode 2021 sampai 2025. Untuk mencapai target tersebut kami terus melakukan pengawasan atas pelaksanaan proyek pembangkit EBT secara berkala agar proyek dapat selesai sesuai dengan COD yang direncanakan, melaksanakan *monitoring* dan konsultasi lintas kementerian lembaga secara rutin untuk *the bottlenecking* permasalahan yang dihadapi oleh pengembang serta memfasilitasi penyiapan *visibilities study* dan studi koneksi jaringan untuk mencapai kelayakan mempercepat realisasinya, kelayakan proyek.

Bapak Pimpinan serta Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan dan selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan untuk dilanjutkan pada agenda selanjutnya, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih bapak menteri atas pemaparan dan penjelasannya.

Baiklah untuk selanjutnya Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat, baik yang hadir langsung maupun melalui *virtual*. Marilah kita mendalami dan memberikan tanggapan dan juga mungkin pertanyaan atas apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Sebagaimana biasanya kami mulai dari Fraksi PDI Perjuangan dan kami mohon waktunya cukup ketat ya? Setiap fraksi maksimal 5 menit, Ibu Merci ya?

**F-PDIP ( H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):**

Pak, Falah Amru dulu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oh Pak Falah Amru?

Iya dipersilakan yang terhormat Bapak Falah Amru dari Fraksi PDIP Perjuangan.

**F-PDIP ( H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Alhamdulillahirobbilalamin.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII,  
Yang saya hormati Bapak Menteri,  
Pak Sekjen beserta jajarannya,  
Dari SKK juga hadir,

Dari Pertamina hadir.

Saya tertarik melihat dengan yang disampaikan Pak Menteri tentang strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia. Mohon izin Pak Menteri, harusnya pemerintah juga berani memberikan misalkan...*(suara tidak jelas)*...yang sangat menarik dan juga dapat bersaing dengan yang ditawarkan negara lain dan di sini saya belum melihat ada strategi seperti itu karena memang untuk mengembalikan kepercayaan investor itu ya amat sangat susah, susah sekali tapi kita harus mempunyai keyakinan yang masih beroperasi di sini kayak misalkan Exxon, terus kemudian...*(suara tidak jelas)*... dan lain-lain, ketika mereka dikasih insentif yang lebih besar, mereka *insya* Allah mau investasi kok, untuk eksplorasi, *insya* Allah itu bisa, tapi iya investor besar itu kadang juga, diversifikasinya sekarang udah baurannya udah masuk ke energi terbarukan, kan gitu, tapi saya yakin kalau intensif itu juga pemerintah usulkan kita untuk menjaga dan menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia ini bisa dilakukan.

Selain itu kita juga harus mendorong Pak Menteri, pengembangan lapangan yang memang sudah terbukti cadangannya besar. Di sini kalau saya melihat, mendorong eksplorasi yang agresif untuk penemuan besar, kita sudah punya kok yang besar cadangan Masela jelas itu. Masela itu cadangannya sangat besar sekali, tinggal kemudian kita memberikan kebebasan kepada investor memilik LNG-nya *onshore* atau *offshore*, tambah lagi dikasih insentif fiskal yang lebih menarik dan ini juga akan membuat kita bisa bertahan atau juga lebih meningkatkan sumber minyak yang kita punya untuk kita eksplor. Jadi saya pikir kita harus, harus melakukan itu, kita harus melakukan penemuan cadangan-cadangan besar, *wong* kita sudah ada kok masih aja dananya besar kok tinggal bisa membilas udah ada kok masyarakat dengan pemerintah harus berani mengambil kebijakan tersebut.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Menteri.

*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Dari Fraksi PDIP Perjuangan.

**ANGGOTA KOMISI VII :**

Ketua, Pak Ketua, lanjut Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Lebih baik begini, nanti kita *round* dulu, nanti tahap 2 kita buka kembali untuk selanjutnya bisa dari. Jadi Pak Menteri menegaskan *mbok yao*, apa itu *mbok yao*? *Mother guest*, ada *fiscal term* apa tuh, supaya menarik bagi investor besar dan seterusnya tadi. Jadi betul saya kira ini menjadi kita, *concern* kita

karena di hulu juga mulai agak berat ini, Pak, Pak Dwi juga mungkin ini bagaimana menciptakan kondisi yang agar menarik semenarik-menariknya. Dalam diskusi informal kami telah sepakat tadi akan ada *fiscal term* Pak Menteri, iya, sama-sama memperjuangkan *fiscal term* ini.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar, dipersilakan.

Ini ada Ibu Roro, ada siapa? Bu Roro.

Yang terhormat dipersilakan Ibu Roro Esti.

**F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.) :**

Baik Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam.*

**F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.) :**

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pak Sugeng,  
Pak Edi,  
Seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan,  
Pak Menteri SDM beserta seluruh jajaran,  
Ada kepala SKK Migas, dan juga;  
Ibu Dirut Pertamina dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Saya ingin menyoroti dua hal Pak Menteri, jadi yang pertama berkaitan mengenai harga BBM ya. Lalu kemudian yang kedua mengenai *roadmap* daripada pengembangan EBT sejauh ini di Indonesia.

Jadi yang pertama mengenai harga BBM, kita mengetahui bahwasanya kondisi geopolitik itu kan sangat menentukan kondisi di Indonesia gitu tidak lepas dari peran yang saat ini terjadi di Rusia dan Ukraina dan ini berapa kali selalu saya sampaikan ketika Rapat Kerja dengan para mitra ya memang berkaitan dengan minyak Pak, BBM dan kita tahu bahwa bahkan pada bulan Maret kemarin itu karena US melarang impor minyak gitu ya dari Rusia itu mengakibatkan *grand price* kita itu sampai 130 dolar-an per barel sekian walaupun tadi setelah kita rapat barusan kita tahu juga bahwa ternyata sudah turun ya Pak ya harganya dan kita bisa simpulkan bahwasanya kondisinya saat ini sangat fluktuatif gitu harga, harga BBM, mohon maaf harga minyak dunia.

Nah, maka beberapa saat yang lalu dan mungkin ini nanti disampaikan oleh anggota-anggota lainnya karena ini keluhan dari lapangan Pak

bahwasanya di satu sisi ini berdampak terhadap tentu harga BBM nasional kita dan kita tahu bahwa harga pertamax kemarin kebijakannya adalah ditingkatkan ya kenaikan harga, kita mengalami kenaikan harga karena itu memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari namun karena sistem subsidi kita saat ini itu kan subsidi terbuka Pak. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga contoh di pertamax gitu, di mana harga non si, nonsubsidi masih sama. Jadi itu solar seperti yang Pak Menteri sampaikan juga pertalite, itu berarti khusus penugasan khusus, itu tidak mengalami peningkatan karena sistem subsidi kita terbuka, otomatis seluruh baik itu pelanggan ataupun konsumen BBM bisa gampang *shift* gitu, dari pertamax ke solar ataupun pertalite walaupun sebetulnya *realisticly* mereka itu mempunyai kemampuan untuk membeli Pertamina gitu tetapi iya gampangnya aja ya mencari yang lebih murah.

Nah menurut saya karena sistem terbuka seperti ini kurang *fair* di masyarakatnya, justru masyarakat yang tergolong kurang mampu itu malah tidak bisa menikmati subsidi secara keseluruhan gitu Pak. Nah maka saya kepingin tahu gitu apakah memungkinkan dan saya arahkan, saya rasa mungkin saja sih ketua ya, karena ini kan kebijakan-kebijakan dari DPR, kebijakan dari pemerintah gitu. Kalau misalnya sistem subsidi ini tertutup itu bagaimana gitu, agar lebih sistematis, lebih terukur, lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi penyalahgunaan.

Nah ini *next poin* yang ingin saya sampaikan, karena kemarin kita juga kunjungan ya? Kita melakukan kunjungan spesifik ke TBBM Cikampek dan dalam rangka kita mengantisipasi gitu ya, kelangkaan BBM di saat Ramadhan ini juga menjelang Idul Fitri dan ditemukan ternyata di situ bahwasanya ada pelanggan atau konsumen, satu mobil itu Pak Menteri, mengunjungi sebuah SPBU bahkan bisa 10 kali dalam 1 hari dan ini saya yakin terjadi bukan hanya di situ saja tapi di seluruh SPBU, saya merasa pasti ada aja cerita seperti ini.

Kita tahu bahwa saat ini kan masyarakat genting ya Pak Ketua, maksudnya situasi yang sangat sulit gitu loh dan ketika kita mengetahui bahwa ada kondisi seperti ini, nah apa tindakan dari pemerintah? Apa tindakan dari Pertamina? Karena sebetulnya ada kewenangan untuk baik itu menutup SPBU tersebut atau ada tindakan-tindakan lainnya yang akhirnya, ya kita harapkan tidak terjadi lagi. Ini kan berarti ada penyalahgunaan, ada keterlibatan oknum gitu ya yang bermain di sini dan saya rasa ini nggak *fair* untuk masyarakat.

Itu dua hal yang ingin saya titik beratkan untuk BBM, lalu kemudian EBT, di satu sisi saya itu menyadari ya bahwasanya *realisticly* kondisi saat ini di Indonesia bagaimana kita bisa mempertahankan ataupun merealisasikan inilah *energy security* gitu.

Kita tahu bahwa mayoritas dari sumber energi yang kita optimalkan datang dari sumber energi fosil gitu dan mungkin nanti akan *highlight* juga oleh teman-teman berdasarkan bagaimana misalnya dengan target 1 juta barel kita pada tahun 2030 tetapi di sisi lain kita tahu kemarin kita menyelenggarakan ada IPU di Bali dan tema besarnya adalah *getting to zero* gitu, bagaimana kita *mobilize parlementarion* di seluruh dunia untuk bisa melakukan *climate action* sedangkan di satu sisi G20 Pak, kita juga *house country* di mana salah satunya

adalah *energy transition*. Iya saya berharap bahwa ini bukan hanya forum yang kita selenggarakan, kita bicarakan tetapi apa aksi konkritnya itu tidak terlalu dirasakan.

Nah maka saya harap ini kita bisa gunakan sebagai momentum tersendiri untuk melakukan percepatan, *now is the time* sebetulnya tetapi di satu sisi oke gimana caranya kita tetap bisa ketahanan energi nasional kita itu bisa terjaga, jadi eksplorasi apa yang perlu dilakukan baik itu *oil and gas sector* tapi di satu sisi bagaimana EBT ini tetap bisa kita gaungkan gitu.

Tadi disampaikan bahwa target 2022 adalah 15,7% daripada total bauran energi nasional kita sedangkan kita tahu target tahun 2023 adalah 25% gitu, kok saya melihat dengan selisih 10% ini udah seperti tidak mungkin kita bisa mencapainya walaupun saya tahu bahwa peraturan ataupun kebijakan itu ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya tidak sama seperti yang kita alami saat ini dengan adanya Covid dan lain sebagainya, tapi apa gitu, apa apa yang bisa kita lakukan?

Tadi di *slide* Nomor 18 juga disampaikan mengenai...(suara tidak jelas)... daripada PLTU di mana tidak ada pembangunan PLTU baru mulai tahun 2026, nah pertanyaan saya kenapa tidak bisa segera kita lakukan itu gitu? Apakah kita, apa ya? Karena sudah ada mungkin *agreement-agreement* yang sudah berjalan hingga hari ini yang tidak bisa kita *cancel* begitu saja atau apa gitu? Karena sebetulnya pada dasarnya kembali lagi saya ingin akhiri, menyampaikan bahwa semua ini kan *political will* bahwa kita semua mempunyai kewenangan dalam di ruangan ini dan sebetulnya setiap orang di sini juga mempunyai apa *power* gitu.

Kembali lagi apa yang menurut kita prioritas dan bagaimana kita ingin menggunakan power tersebut? saya berharap bahwa ke depannya ada sebuah *planning* yang holistic sesuai daripada target-target yang sudah ditentukan karena jangan sampai target-target itu dan pasti itu melibatkan banyak orang, rapat sedemikian banyak gitu ya? yang akhirnya tidak terlalu menghasilkan apa-apa itu. Jadi sekian 2 poin inti mengenai BBM dan EBT dari saya, terima kasih Pak Menteri.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ibu Roro Esti dari Fraksi Partai Golkar, menggaris bawahi subsidi terbuka, subsidi tertutup ini memang menarik sekali, memang terbuka itu dengan konsekuensi terjadi distorsi-distorsi sebagaimana dikemukakan tadi dan juga tentang *energy security* juga EBT versus fosil ini bagaimana kebijakannya.

Selamat Pak ini ada juga pimpinan, Pak Maman dengan Pak Dony.

Kok Pak Maman datang dengan senyum-senyum? Dari rumah? Oh gitu.

Iya baiklah selanjutnya kita lanjutkan Fraksi Partai Gerindra, Gerindra.

Oh tidak belum?

**ANGGOTA KOMISI VII :**

Izin skip, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Belum ya, di ini dulu.

Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem, yang terhormat dipersilakan Bapak Arkanata.

**F-P.NASDEM (ARKANATA AKRAM, S.T., B.E.(Hons) Meng.Sc. :**

Iya terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VII, beserta

Rekan-rekan Komisi VII, dan

Yang terhormat Mitra Komisi VII maupun dari Menteri ESDM,

Kementerian beserta jajarannya maupun dari BUMN dan lembaga-lembaga yang terkait.

Mungkin saya singkat saja Pimpinan hanya satu dan sebagai penambah akan apa yang sudah di menjadi saran dan pertanyaan dari rekan-rekan Komisi VII yang sebelumnya, di luar dari subsidi BBM dan juga di luar dari dengan tujuan peningkatan *lifting* migas kita untuk sampai hari ini.

Saya pingin bertanya terkait target 2025 nanti mengenai *over supply*; pertama *over supply* energi dalam bentuk listrik, sebenarnya kira-kira bagaimana nanti langkahnya dari pemerintah? Memang di sini pemerintahan kan memang eksekutor dari sebuah kebijakan dan memang dalam *slide* nomor 10 dan 11 itu sudah dijelaskan beberapa hal kurang lebihnya memang belum mendetail dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang juga efeknya untuk menghadapi *over supply* listrik di Indonesia tahun 2025, hanya saja sebenarnya *over supply* listrik pada tahun 2025 itu nanti kan juga akan dihadapkan dengan kekurangannya infrastruktur listrik di berbagai tempat di Indonesia terutama di daerah-daerah 3T, daerah-daerah seperti Kalimantan Utara dapil saya, daerah-daerah di Indonesia Timur seperti Maluku maupun juga Papua.

Saya kira ini menjadi keseriusan yang perlu dihadapi agar nanti ketika menghadapi *over supply* tersebut akan perlu juga diperhatikan masyarakat-masyarakat yang juga belum bisa mendapatkan listrik karena kalau misalnya kita membaca mengenai elektrifikasi di Indonesia kalau misalnya hanya survei berdasarkan kayak disampaikan satu desa kalau misal ada dua rumah yang terlistriki maka dikatakan itu adalah elektrifikasi penuh, menurut saya itu salah.

Kalau misalnya saya hanya memberi contoh di Kaltara itu tahun 2021, rasio elektrifikasinya masih sekitar 70% dan itu kan yang dihitung berdasarkan KK secara langsung per rumah dan saya kira itu adalah data yang akurat bukan data yang hanya melalui survei dalam artian masih kurang infrastruktur listrik di Indonesia tetapi kita akan menghadapi *over supply* bagaimana nanti pemerintah ini akan menyeimbangkan antara *over supply* listrik dengan kekurangan infrastruktur tersebut karena harapan kami adalah kalau bisa infrastrukturnya lebih diutamakan terlebih dahulu, itu adalah hal yang paling utama supaya seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dan listrik yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Wabillahi taufik walhidayah.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Pak Arkananta dari Fraksi Nasdem, sekali lagi ini persoalan *over supply* kemungkinan ditahun 2025 yang kebetulan masih *heavy*-nya fosil elektriknya dan juga tadi tentang elektrifikasi yang berbasis pada kepala keluarga ini Pak Menteri yang selama ini dihitung elektrifikasi 99% berbasis desa dan nanti ini menjadi dapat untuk dipertajam lebih lanjut.

Selanjutnya dipersilahkan yang terhormat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, loh mana nih?

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.) :**

Cek, cek.

**KETUA RAPAT:**

Oh di kiri sekarang?

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.) :**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Wah ini saya terpaksa agak, dipersilakan yang terhormat Ibu Ratna.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Bapak Ketua,  
Para pimpinan, serta  
Sahabat-sahabat Komisi VII,  
Yang kami banggakan Pak Menteri beserta para Dirjen,  
Ibu Dirut Pertamina,  
Bapak Kepala SKK Migas juga jajarannya yang lain, semoga semuanya tetap  
sehat ya Pak, Ibu karena sepertinya hari ini selain tensi lahir kita sedang tinggi,  
tensi bathin kita juga sedang tinggi.

**KETUA RAPAT:**

Waduh.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.) :**

Siap.

Yang pertama terima kasih atas pemaparannya Pak Menteri, kami juga mengapresiasi ini sampai dikasih rincian satuan tiga seperti yang diminta oleh Pak Nasir beberapa waktu yang lalu.

Saya ingin mengingatkan kembali saja bahwa apa yang menjadi kesimpulan rapat kerja kita hari ini maupun sebelum-sebelumnya itu mohon benar-benar dijadikan pegangan karena itu sudah atas kesepakatan sehingga kami juga meminta komitmen bersama bagaimana kita harus menjalankan dengan baik kesimpulan rapat tersebut.

Yang pertama, saya ingin menanyakan di halaman 10 Pak Menteri, terkait strategi menghadapi dampak kenaikan minyak dunia. Kami mengapresiasi ada beberapa strategi yang sudah dipersiapkan begitu baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, yang *goal*-nya adalah pengoptimalan produksi merupakan strategi yang paling mendasar yang bisa kita lakukan begitu untuk menghadapi kenaikan harga minyak dunia padahal, padahal Pak, kecenderungannya ini kan *declaine* ya, turun gitukan baik itu karena memang cadangan kita yang semakin lama semakin menipis, juga karena banyak pihak yang menyampaikan kalau iklim investasi migas di Indonesia itu kurang begitu baik.

Nah mungkin Pak, bisa disampaikan tadi persis apa yang yang dikemukakan juga oleh senior kami Gus Falah, kira-kira strategi apa nih yang bisa dipersiapkan pemerintah untuk menjaga iklim investasi ini begitu, selain *fiscal term* ya, apalagi? Apakah kemudahan regulasi atau apa yang bisa memantik para investor migas itu kembali bersemangat begitu untuk berinvestasi di Indonesia.

Yang berikutnya saya ingin menanyakan Pak, Program *Chemical EOR*; ini kan udah kita dengar dari mulai, kalau saya, saya baru di Komisi VII dan di DPR RI juga, saya udah sering banget denger ini dari tahun 2019 sepertinya. Nah, saya pengen ngerti seberapa persen, seberapa besar persentase yang diberikan oleh Program *Chemical EOR* ini sehingga itu terus-menerus dijadikan strategi utama gitu? padahal kalau sepengetahuan kami banyak loh teknik-teknik yang lain yang lebih *update* gitu maksudnya di bidang migas ini, mungkin nanti bisa disampaikan.

Yang berikutnya beberapa waktu lalu kami mengadakan RDP dengan Dirut Pertamina Holding, nah beliau menyampaikan bahwa Indonesia ini ternyata pemerintah tidak memiliki cadangan minyak apa Bu Nike istilahnya? Izin interaktif ketua, yang ternyata itu miliknya Pertamina gitu intinya bukan milik negara. Boleh disampaikan Ibu Nike?

**DIRUT PERTAMINA (NICKE WIDYAWATI) :**

*Strategic view reserve.*

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.) :**

*Strategic view reserve* itu ternyata Indonesia tidak punya, yang punya itu Pertamina, nah begitu. Jadi menurut saya Pak Menteri, ini berbahaya sekali apalagi kalau tadi disampaikan Dinda Roro posisi geopolitik yang ada di dunia ini trendnya sudah mulai suka perang-perangan ini untuk ketahanan energi kita, ini sangat berbahaya, kira-kira apa yang membuat sampai negara itu tidak punya itu gitu loh, jadi malah Pertamina yang memiliki padahal di beberapa negara yang lain, itu mereka sama-sama punya, jadi negara punya, badan usaha yang bergerak di bidang tersebut juga punya.

Yang berikutnya, tadi kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di awal terkait komitmen kita dalam kesimpulan-kesimpulan rapat kerja Pak Menteri, ini banyak sekali keluhan dari teman-teman, sahabat-sahabat kami baik yang hadir maupun tidak hadir tapi diwakilkan kepada saya, bagaimana program kerjasama kita untuk konstituen yang ada di daerah pemilihan masing-masing itu belum berjalan dengan baik. Saya sebut ya program *converter kid*, ini di Jawa dan diluar Jawa, program PJUTS khususnya untuk Indonesia Timur, ini 2021 katanya belum terpasang sampai hari ini.

Kami mohon, kami mohon beberapa waktu lalu saat kita melaksanakan Rapat Kerja, saat kalau tidak salah ini waktu kita menyepakati rencana anggaran 2022 kalau tidak salah. Ini kita sudah bersepakat bahwa kesimpulan rapat poin kedua, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM Republik Indonesia untuk memprioritaskan program yang terkait kebutuhan masyarakat dan memastikan agar realisasi anggarannya dapat sesuai perencanaan di awal, kira-kira kalau sampai permasalahan ini muncul dan tidak bisa diselesaikan di belakang, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Kami mohon dirjen-dirjen terkait segera menghubungi sahabat-sahabat kami supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak berlarut-larut.

Yang terakhir, yang terakhir Pak Menteri, saya juga memberikan apresiasi begitu ya terkait program sidaknya Pak Menteri bersama dengan entitas terkait di beberapa SPBU untuk menjaga ketersediaan BBM dalam rangka menyambut Ramadhan sebelum lebaran bahkan sesudah lebaran. Ini penting Pak Menteri, bapak ini termasuk menteri yang tidak suka di *publish* begitu ya Pak? Jarang banget kita lihat Pak Menteri kita di TV ini? Betul ya teman-teman ya? Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin bahwa sesekali Pak Menteri, Bapak harus tampil untuk bisa menjelaskan ke publik apa-apa saja yang menyebabkan beberapa produk-produk yang terkait dengan nomenklatur kementerian Bapak ini harganya bisa naik sehingga tidak semuanya kesalahan itu ditimpakan kepada bapak Presiden dan kepada negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri.

*Wallahulmuwaffiq ila aqwamit tharieq.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Ibu Ratna Juwita Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari hulu migas dan EOR cadangan nasional, program yang sudah disepakati dalam rapat kerja dan terakhir ada nasehat Pak Menteri harus sering-sering pakai topi apa itu yang kemarin di pom bensin itu, ganteng juga kok ternyata. Saya kira penting betul supaya masyarakat mendapatkan penjelasan yang komprehensif perihal tentang berbagai hal menyangkut tentang BBM misalnya itu.

Dilanjutkan Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.) :**

Sartono.

**KETUA RAPAT:**

Yang terhormat Pak Sartono Hutomo.

**F-PD (SARTONO, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Komisi VII yang kami hormati,  
Para Sahabat Komisi VII yang kami hormati pula,  
Pak Menteri dengan seluruh jajarannya,  
Dirjen, Sekjen, dan juga  
Dirut Pertamina,  
Ada BPH Migas yang kami hormati.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

*Walaikumsalam.*

**F-PD (SARTONO HUTOMO) :**

Pak Ketua, untuk merespon tadi Ibu Ratna terhadap Bapak Menteri supaya agar lebih sering tampil kayaknya harus nyapres ini, Pak. Jadi kalau nyapres itu kan beberapa menteri itukan sampai segala sudut-sudut dipasangin itu baliho, iyakan? Jadi begitu itu, untuk memotivasi beliau. Jadi terima kasih Pak, ini biar tidak ini, ini kan beberapa Menteri kan juga aktif begitu kan Pak Menteri? Jadi sampai setiap toilet aja ada balihonya juga itu, strikernya juga itu, begitu Pak Menteri, baik terima kasih.

Biar tidak terlalu apa, tegang ini, terima kasih waktunya.

Pak Menteri tadi Bapak menyampaikan perihal apa pemerintah baru saja me-*launching* sistem informasi mineral dan batubara atau Simbara ya? Saya ingin tanyakan sejauh mana kira-kira sistem informasi mineral dan batubara ini dapat membantu pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dalam situasi yang sedang prihatin lah kita ini, kalau itu apa harapan kita memang terjadi suatu lompatan lah dalam penerimaan negara dalam sektor ini, selain itu apakah juga sistem ini juga dapat diakses oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUP misalnya, dan juga apakah Simbara ini sama dengan sistem yang dimiliki sektor hulu migas kita yang datanya selalu di *update* setiap harinya. Mohon penjelasan nantinya.

Kedua Bapak, bulan Februari itu kita mengadakan rapat kerja juga dengan apa Kementerian ESDM perihal waktu itu kesimpulan dari pada Komisi VII dengan Kementerian SDM pada Kamis 17 Februari 2022 Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM RI bersepakat untuk mendukung pembentukan entitas khusus yang bertugas memungut iuran sesuai aturan yang berlaku dari Badan Usaha Batubara untuk menutupi selisih antara harga pasar batubara untuk domestik dan harga patokan atau apa untuk DMO, untuk sektor energi dan industri lainnya. Lah yang ingin kami tanyakan, kira-kira apakah itu masih apa berproses itu, atau juga kalau memang sudah diproses sampai dimana itu perkembangannya karena jangan sampai apa-apa yang sudah menjadi suatu kesepakatan, keputusan itu tidak ditindaklanjuti misalnya, jadi kami mohon sampai di mana itu perkembangan daripada apa kesepakatan itu antara Komisi VII dan DPR RI dan ESDM.

Ketiga, kami bersepakat apa yang disampaikan oleh para sahabat tadi tentang investasi apa di sektor apa, migas. Di satu sisi kita apa semakin tahun *lifting* minyak kita semakin turun, kita sudah 600 ini, satu sisi kebutuhan kita 1 poin 3.000.000 per harinya. Nah ini juga harus ada suatu keputusan yang radikal begitu, dari radikal yang ekstrem begitu di masa-masa 2 tahun ini Bapak Menteri dan apa kalau *insya* Allah nanti kita terpilih kembali harus juga

bersepakat mengawal kebijakan-kebijakan itu untuk bagaimana negara dalam hal ini APBN begitu untuk apa fokus betul dalam hal sektor energi ini yang tadi Bapak Menteri saya sampaikan, saya bilang ngeri-ngerinya ini, sudah ngeri ini Pak Sartono, nah dalam hal ini bagaimana ini, ada hal yang lebih apa itu, ada lompatanlah begitu menjadi suatu kebijakan pemerintah, iya apa presidenlah begitu, untuk supaya ada satu langkah raksasa lah dalam sektor ini. Satu sisi, ada transmisi energi baru terbarukan, ini juga harus digenjot juga, jadi sama-sama digenjotlah urusan nantilah begitu tetapi yang jelas *declaine* kita ini dalam sektor sumber apa minyak kita, ini yang apa menjadi suatu *concern* kita dan saya pikir lebih apa, saya memberikan penguatan apa yang tadi disampaikan oleh para sahabat. Kurang lebih demikian Pak Menteri, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.

*Wabillahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Sartono Hutomo.

Jadi Simbara ini bagaimana apa bisa diakses oleh seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan? Saya ingat nih Simbara itu adalah nama artis ya dulu ya? Cok Simbara, iya, kan jadi lebih, lebih mudah diingat betapa pentingnya ini sistem informasi.

Begitu ya?

Iya juga tadi lembaga yang pernah menjadi komitmen kita, BLU dan sebagainya dan sebagainya untuk tadi apa DMO, harga DMO dan seterusnya.

Sektor hulu migas bagaimana tetap digenjot meskipun EBT juga kita genjot, kok ini senang dengan istilah digenjot ini Pak Sartono? Iya betul memang migas saya kira perlu tetap di apa? tetap semenarik mungkin, ini gara-gara digenjot itu karena Pak Dwi ini sering bersepeda nampaknya, iya betul Pak Dwi? Pak Dwi? Iya saya kira itu beberapa hal.

Selanjutnya adalah dari Fraksi Partai PKS ya? Ada Pak Tif, yang terhormat Pak Menteri dipersilakan Pak Menteri.

#### **F-PKS (Ir. H. TIFFATUL SEMBIRING) :**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera atas kita semua.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran,

Pak Sekjen,  
Pak Irjen,  
Dirut PLN,  
Ibu Nike ada?  
Pak Dwi, oh *online*?

**KETUA RAPAT:**

Dirut PLN hadir *online*.

**F-PKS (Ir. H.TIFFATUL SEMBIRING) :**

Oke.

**KETUA RAPAT:**

Katanya.

**F-PKS (Ir. H.TIFATUL SEMBIRING) :**

Pak ketua, Pimpinan semuanya.

Pak Maman, udah sehat orang tua ya? *Alhamdulillah* ya.  
Pak Doni yang lagi masih sibuk kirim-kirim apa.  
Dan teman-teman semua yang hadir fisik maupun yang *online* ya.

Burung Elang melayang cepat, menyambar mangsa tempat di tengkuk, BBM ini menyangkut nasib rakyat, salah bicara kita bisa digeruduk, iya? Jadi hati-hati bicara BBM nih. Kemarin baru satu orang diseruduk di depan ini ya? Baik, makasih Pak Menteri atas paparannya.

Pertama kita apresiasi tentang halaman 6, realisasi Pak Menteri; ada kelebihan dikit lah yang 0,2 tapi lumayan lah, yang penting dijaga kedepan ini asistensi serapan ini Pak Menteri karena secara makro budget di manapun di negara manapun, itu adalah sebagai *trigger* bagi produk domestik bruto. Iya jadi supaya bergulir atau Bergeraknya ekonomi dan transaksi di masyarakat, ini kayak darah ini Pak Menteri, jadi darahnya ngalir kalau darahnya macet itu apa bisa struk ya Pak Menteri ya? Negara pun bisa struk nih kalau berhenti ya? Jadi swasta dan UKM bisa bergerak lagi artinya ke depan karena banyak juga orang yang salah paham bahwa menahan anggaran itu bukan menghemat itu artinya tapi menyebabkan produk domestik bruto kita tidak tercapai target nya, itu yang pertama.

Yang kedua di halaman 9, iya tentang ICP, berarti ada kelebihan nih ya? Ada asumsi pendapatan negara di sektor minyak ya Pak Menteri ya dari tadinya asumsi 63 US dolar per barel ternyata realisasinya udah 3 bulan ini, 3 bulan ini udah 98,4 dolar per barel. Jadi kalau saya hitung-hitung nih 1 bulan aja bisa bertambahnya 10 triliun ya, kalau ini bertahan ya? 10 triliun ya Pak Menteri ya? Kalau dilihat dari mohon interaktif sedikit Pak Ketua.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Iya memang kalau dari melihat dari komoditi migas yang kita jual memang ada kenaikan tetapi dilain sisi juga ada subsidi yang tiap 1 dolar kenaikan yaitu untuk BBM itu dampaknya kenaikan anggaran 5,7 triliun.

**F-PKS (Ir. H.TIFATUL SEMBIRING) :**

Oke dan kita juga masih net impor maksud saya kan ke sana kita cerita nanti kan? tapi yang penting kan nanti *balancing* ini Pak Menteri ya, balancing daripada apa dari budget kita nih.

Nah kemudian halaman 12, ini oke penambahan, usulan perubahan kuota BBM tapi kami juga soal Fraksi PKS mengusulkan agar Pak Menteri usulkan penambahan subsidi ya kepada Menteri Keuangan mengenai BBM dan gas LPG, Pak. Jadi begini, inikan masalah politik anggaran ya, mungkin ya kalau kita kenakan pajak orang ya, kan sumber ini kita tuh terbesar dari pajak ya, sumber pendanaan APBN kita.

Nah kalau itu dinaikkan yang terkena orang kaya ya, orang yang berpenghasilan relatif terbesar lah dan ya kemarin juga cukup ramai ketika produk-produk pertanian juga mau di apa mau di pajakin gitu. Nah, itu orang kaya tapi kalau kita memberikan subsidi, jadi intinya kita adalah subsidi ini di usulkan supaya apa dinaikkan atau dipertahankan karena harga LPG untuk 3, untuk 3 kg, LPG 3 kg, Solar, pertalite ini, inikan orang-orang kecil Pak Menteri ya? artinya ini lebih apa, lebih, lebih, lebih memasyarakat gitu, kemanfaatannya lebih banyak, artinya kalau ingin dari sisi politik anggaran, kita masih bisa menawarlah mungkin pajaknya, apakah sistem dulu ada tax amnesty dan sebagainya bisa dijalankan.

Nah, hal-hal yang kecil yang menyangkut hidup orang banyak terutama di kalangan bawah ini, ini tolong di usulkan supaya subsidi itu ditambah. Satu sisi kami juga mempertanyakan bahwa dana Jargas ini dialihkan Pak ya? Ke mana? Tolong dijawab nanti aja Pak, ke proyek Cisem itu Pak? Oh nggak. Jadi kalau ini, ini kan 1 triliun dulu cukup ramai kita diskusi juga di sini, nah kalau ini dibatalkan bagus juga karena ini terkait dengan Kalau Jargas ini kan lebih apa lebih mengena juga subsidinya di masyarakat.

Yang terakhir Pak Menteri, saya apresiasi juga ini masalah apa tadi Simbara, ini bukan Cok Simbara ya Pak Ketua, SIM itu Sistem Informasi Mineral. Memang sistem informasi digital ini dia akan bersifat *trustable* ya, artinya dia mudah dilakukan *the bagger*. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan, kita mudah untuk melacaknya, saya apresiasi ini dan sehingga apa tidak ada lagi istilahnya kalau dana bawah map, dulu bawa map atau amplop ya, pokoknya dibawah-bawah itulah dan juga akan membuat semakin menurunnya *cost* dalam dalam segala transaksi karena *paperless* dan transportasi dan juga pembelian-pembelian barang kita apresiasi ini dan mudah-mudahan ini semakin menambahkan apa dalam pengelolaan batubara dan mineral ini menuju *good corporate governance* kita, semakin transparan, semakin akuntabel dan juga partisipasi masyarakat juga bisa dilibatkan di situ.

Barangkali itu yang bisa disampaikan Pak Ketua, lebih kurang mohon maaf.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Jadi Pak Tif dari Partai PKS menggaris bawahi tentang fungsi APBN dalam produk domestik bruto, saya kira betul sekali dan tadi soal ... (*suara tidak jelas*)...tapi betul juga ada juga kita subsidi yang naik dan juga mengusulkan penambahan subsidi Pak ya untuk di khususnya di LPG sama oh iya BBM karena betul migas kan kalau tidak salah di APBN tahun 2022 hanya 77 triliun dengan ICP 63 dolar dengan ICP yang sudah naik rata-ratanya mencapai 98,4, saya kira ini mohon maaf bukan membela Pertamina, memang iya babak belur Pertamina nya yang ditugasi untuk menjalankan fungsi-fungsi BSO dan yang lain-lain.

Dipersilakan selanjutnya Fraksi PAN.

Ada terhormat Pak Menteri juga nih beliaunya Pak Asman Abnur dipersilakan yang terhormat.

**F-PAN (Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang.  
Salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan dan Komisi VII yang saya hormati.

Hari ini lengkap pimpinan, biasanya ada yang kosong sekarang lengkap.

Terima kasih Pak Ketua,  
Anggota dan seluruh kawan-kawan yang ikut secara *online*,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,  
Hadir juga saya lihat Kepala SKK Migas,  
Ibu Dirut Pertamina.

Saya hanya menyoroti melihat halaman 12 Pak Menteri, di sini ada judulnya usulan perubahan kuota BBM dan LPG. Ini sudah dihitung bener angka ini atau dasarnya dari mana Pak usulan ini? Apakah karena melihat panjangnya antrian beli BBM kemarin, hasil sidak dilapangan atau memang kebutuhan yang direncanakan sebelumnya, memang kurang maka timbullah

yang namanya usulan perubahan ini. Jadi sumbernya atau dasarnya apa usulan ini Pak Menteri, supaya terukur, ini yang pertama.

Nah kemarin, saya ikut kunjungan kerja ke Cikampek, anak buahnya Bu Dirut Pertamina itu menyampaikan sistem pengawasan di lapangan bahkan kawan-kawan Pertamina di lapangan itu sudah punya daftar nomor mobil yang selalu bolak-balik ke SPBU terus kita tanya apa tindakan setelah tahu nomor mobil yang bolak balik sampai 3 kali, disampaikan oleh kawan-kawan tadi sampai ada yang 10 kali, rupanya ini mungkin perbaikan buat sistem pengawasan kita.

Hasil data yang diperoleh dari lapangan itu harus dikirim dulu ke pusat Pertamina, kemudian pusat Pertamina baru melaporkan ke Mabes Polri. Sementara ini udah kejadian dilapangan baru dilaporkan setelah sekian lama, ini nggak nyambung antara pengawasan dengan tindakan. Nah, saya kemarin mengusulkan karena ini kebanyakan yang ngantri itu truk-truk perusahaan atau yang sebenarnya mereka nggak berhak untuk memakai subsidi ini, mestinya dilapangan harus ada yang *standby* petugas pengawas itu. kalau nggak bakalan terjadi lagi Pak Menteri apalagi kalau ini diekspos ternyata ada penambahan kuota untuk BBM dan LPG, ini bakal panjang lagi nanti antrinya, padahal ini baru usulan. Nah ini baru usulan, apakah ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Pak Menteri, mungkin interaktif saja.

Boleh disetujui atau masih usulan?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Masih usulan.

**F-PAN (Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.):**

Hah masih usulan?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Kita akan, kita akan usulkan.

**F-PAN (Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.):**

Iya kalau ini nanti terekspos Pak, ini bakalan terjadi lagi di lapangan, di lapangan itu orang akan melihat kan sudah ada usulan, kok BBM nya nggak ada. Nah, ini mungkin eksposenya harus hati-hati dulu Pak Menteri, nah sekaligus ke Dirut Pertamina, saya sampaikan. Mungkin sistem pengawasannya jangan tersentral begitu bu karena kerjasama dengan Polri ya mungkin, pangkalan di lapangan itu kerjasamanya dengan Kapolres setempat kemudian aksi lapangannya seperti apa? Jadi sebelum mobil yang nggak berhak itu ngantri, dia harus ditindak sebelumnya. Jangan kejadiannya sudah di isi, habis itu baru kita ributkan, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, untuk menjaga kebocoran itu, saya pikir perlu dibuatkan mekanisme pengawasan yang detail antara kementerian maupun dengan Pertamina sehingga antrian-

antrian yang nggak berhak itu bisa kita antisipasi, ujung-ujungnya nanti yang salah SPBU, Pak.

Ini kan saya kebetulan punya SPBU Bu Dirut, udah lama banget. Nah, beban SPBU itu bertambah lagi untuk nyari pengamanan *di situ*. Nah, menurut saya kalau ini bisa diatur pengawasannya dari Pertamina dan kerja sama dengan polisi daerah, ini akan bisa menyelesaikan masalah lebih awal, jangan terjadi dulu baru kita lakukan tindakan. Nah, saya cuman konkritnya itu aja Pak menteri, mudah-mudahan disetujui dengan catatan diikuti dengan sistem pengawasan yang benar, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Jadi betul pengawasan untuk ditingkatkan dengan penindakan hukum yang sesegera mungkin, saya kira itu yang digarisbawahi bahkan secara eksplisit karena pengalaman beliau punya pom bensin, kalau perlu ada 2 orang bersenjata di situ dari polisi supaya memberi efek deteren kalau istilahnya kan.

Iya dilanjutkan Fraksi PPP. Ada hadir diforum?

Kalau tidak ada, kita buka putaran kedua dari Fraksi PDIP Perjuangan dipersilakan Ibu Mercy, 5 menit ya, jangan juga meneteskan air mata luluh kami semua, kami nanti.

#### **F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Baik terima kasih Pak Ketua.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati,  
Pimpinan komisi yang lain,  
Yang terhormat Pak Menteri dan seluruh jajaran,  
Hadir Pimpinan BUMN terkait,  
Ibu Dirut Pertamina,  
Dari PLN juga hadir ya,  
Dari SKK Migas dan yang lain-lain.

Saya langsung saja cuman 2 topik utama;

Pertama soal kelistrikan Pak, dari data yang ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa yang telah dipaparkan oleh Pak Menteri kita dukung penuh, cuman mungkin Pak, mungkin bisa dihitung, mungkin bisa dibikin perhitungan Pak. Jadi berkaitan dengan masalah kelistrikan ini, inikan subsidi juga kan nanti akan naik juga gitu loh ataupun terjadi koreksi. Saya tidak tahu nanti dalam pembahasan Badan Anggaran terjadi *refocusing* dan realokasi lagi karena ini dia terkoreksi dengan nilai tukar rupiah dan lain-lain. Mungkin ini bisa menjadi catatan untuk kita semua, format kita terhadap kelistrikan subsidi listrik untuk

yang tahun ini aja dulu, kira-kira ada terjadi koreksi naik atau tidak atau tetap dengan jumlah yang sama saja, itu yang pertama.

Yang kedua, ini berkaitan dengan infrastruktur survei SDA halaman 5, ini ada satu bagian yang saya lingkari.

Yang pertama revitalisasi EBT 5 provinsi Pak, ini kami mohon kejelasan, saya tidak buka lagi yang tebalnya ya Pak ya, itu provinsi di mana aja? Karena revitalisasi EBT buat kami bukan saja instalasi EBT yang besar-besaran Pak, tetapi instalasi EBT-EBT lama, produk dari periode-periode yang sebelumnya seperti PLTS terintegrasi, dulu itu kan kita minta dari kepala-kepala desa 1-2 hektar tanah Pak dan wilayah-wilayah 3T hampir terimplementasi dengan program-program ini.

Setiap tahun kami dari wilayah-wilayah 3T bukan 3T hampir semua kita Pak, semua kita, itu dapat minimal dari 3 kalau di wilayah 3T itu sampai 5 atau 6 unit. Nah, kami minta yang seperti ini juga ikut di perbaiki karena di beberapa kecamatan yang saya datangi untuk PLT Instalasi EBT yang lama itu kami harap mungkin bisa di *scale up* Pak, ada tower PLN di sana, tidak bisa di *generate* Pak, gitu loh. Jadi ada baiknya kalau bikin PLTS-PLTS terintegrasi melampaui skala ekonomi yang ada di sekitar, jadi bisa naikkan, bisa naikkan *generate tower* listrik, atau tower Telkom atau pun misalnya bisa ikut menambah kegiatan perekonomian masyarakat setempat UMKM dan lain-lain, jadi tidak hanya untuk tiga buah mata lampu Pak, ini harapan kami khusus untuk yang poin revitalisasi EBT 5 provinsi itu. Saya nggak tahu apakah ini masih memungkinkan tapi baiknya produk programnya seperti begini, Pak.

Yang kedua, ini berkaitan dengan urusan PJUTS untuk yang tahun 2022. Surat per 6 April dari Pak Dirjen, Pak Rida sudah kami terima semua dan sudah kita pelajari berkaitan dengan *automatic blog* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tahap pertama itu 40.000 unit dan tahap keduanya 40.000 unit tapi saya pikir Pak kalau masih memungkinkan baiknya terjadi revisi surat Pak karena secara politis amat sangat tidak menguntungkan, baiknya satu surat edaran aja untuk 80.000 unit, mau nanti ada pentahapan, urusan teknis antara kementerian, antar dua kementerian, Kementerian ESDM dengan Kementerian, Kementerian Keuangan. Urusan Kementerian ESDM dengan kami urusannya ini yang 80.000 unit, itu yang pertama.

Yang kedua karena ini secara politis kalau orang baca kayak begini, saya sampai hari ini belum masukin punya saya karena ketika dibaca usulannya cuman sekitar 500, 500 sekian apa namanya pasang baru kepada masyarakat miskin Pak, jadi untuk yang program bantuan pemasangan listrik baru bagi masyarakat miskin ini. Nah, kami harap Pak mudah-mudahan ini ada revisi surat supaya kita urusannya satu kali, satu kaligus jalan. Kita minta data ke kementerian, kita minta data ke masyarakat, kepala desa, ke mana-mana kan kita berdiri di atas surat Pak, kalau kita berdiri tidak di atas surat kita ambil lebih, masyarakat nanti tanya, apa, apakah yang lebih dari kuota ini akan terjawab atau tidak dan seterusnya.

Jadi baiknya surat direvisi, jadi hitung ulang 80.000 itu penentuannya seperti apa, sesudah itu kita minta datanya satu paket keseluruhan Pak, tidak bertahap-tahap. Urusan kita kan dengan masyarakat kecilkan ngambil data, urusan pembagian pentahapan itu urusan keuangan nanti secara ke dalam bahwa nanti ada pentahapannya, tahap pertama sekian dan tahap kedua seterusnya buat saya itu urusan teknis penyelesaian programnya. Jadi saya sangat berharap untuk bantuan pemasangan baru ini, harapan kami surat bisa direvisi, jadi 80.000 sesuai dengan peruntukkan dan kita dibagi sesuai dengan ketentuan 1.124 sesuai dengan keputusan dalam rapat yang terakhir.

Yang ketiga berkaitan dengan pemasangan baru ini Pak, dalam rapat kita ketika membahas, membuka nomenklatur ini diperuntukkan sesungguhnya afirmasi kebijakan bagi daerah-daerah 3T, daerah-daerah potensi terjadi defisit, masih defisit dan seterusnya, dibuka tahap awal dengan anggaran 30 miliar dari dana murni, dana murni kementerian pada saat itu, perjuangan terjadi di badan anggaran dan tambahan lagi 100 miliar, hari ini angka ini dia menjadi 120 miliar.

Waktu dalam rapat itu diketok, teman-teman di sini semua bersepakat bahwa program ini program afirmasi bagi daerah-daerah yang defisit bukan kami meminta lebih tapi memang karena ini pondasi kelistrikan kami dari tidak ada mau dibikin ada gitu loh, bahwa nanti akan dibagi tapi pendekatannya mestinya proposional Pak, tidak bisa dipukul rata seperti begini, ribuan mungkin lebih dari 2 ribuan desa yang ada di Papua, belum Papua Barat, belum Maluku, Maluku Utara, NTT, Kalimantan perbatasan dan seterusnya.

Jadi kami mohon ini ada kebijaksanaan sekali lagi untuk dipertimbangkan ulang Pak Ketua, kami mohon sangat, waktu itu kan *dealing*-nya sampai 2 dirjen berdiri disini, Dirjen Migas dan Dirjen Gatrik. Dana dari Dirjen Migas itu ditarik pada saat itu, untuk apa? untuk mengimbangi anggaran yang begitu besar untuk Indonesia Barat dan Tengah LPG. Semua program bapak-bapak yang ada di sini Indonesia Barat semuanya, wilayah barat, kita dapat PJUTS dan PJUTS untuk kita per orang cuma 300 sekian nggak ada artinya Pak, ditambah dengan bantuan pasang baru ini nggak ada artinya. Jadi kalau kami di pukul rata lagi cuman 500 KK sungguh sangat menyedihkan, ini Pak Bambang sampai ketawa, apa gunanya kita berjuang setengah mati seperti itu dan kemudian ini dia keluar dari balet kebijakan kita bersama.

Yang ketiga Pak, berkaitan dengan 97 PLTD-PLTD yang bermasalah di Maluku dan Maluku Utara. Ini moment Pak, saya hari ini saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk 97 PLTD yang sementara berproses dengan 4 metode Pak, metode yang pertama itu, metode yang pertama Bapak-bapak saya senang sekali dan saya, saya ingin sampaikan terbuka metode yang pertama itu semua akan menyala pada bulan Agustus 2022, 29 lokasi PLTD, yang dari 2016-2017 mangkrak.

Ini saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua Bapak-Bapak baik Maluku, Maluku Utara, akhirnya bisa terlayani. Dua metode, jadi metode yang pertama itu relokasi dan pemeliharaan satuan pembangkit SPD, metode kedua dan keempat yaitu pengembangan *great existing* kemudian relokasi

SPD dan pengadaan SPD baru, ini yang bermasalah Pak. Jadi sebanyak 15 lokasi, lokasi pembangkit di metode kedua yang ditargetkan itu Oktober 2022 dan 14 pembangkit itu ditargetkan metode keempat atau pengadaan baru itu sebanyak pada bulan Juli 2022 ini anggarannya yang tidak *clear*, Pak.

Hasil rapat kami terakhir dengan PLN di Ambon, ini saya nggak tahu dari perwakilan PLN ada hadir atau tidak, mereka menunggu juga kebijakan anggarannya, sementara poin satu dan poin tiga bisa mereka selesaikan dengan sebaik-baiknya, poin 3 itu interkoneksi relasi... (*suara tidak jelas*)... dan sistem *existing*. Data ini data per 20, data per 20, data 20 sekian Maret yang dikirim langsung oleh Pak Dirjen Gatrik begitu kita selesai Rapat Panja Pak, waktu itu saya kita minta data resmi dan telah kami kirim. Nah harapan kami, komitmen dari pemerintah dan PLN terkait untuk menyelesaikan 97 PLTD ini sejak mangkrak, sejak dari periode sebelumnya, sangat menyakitkan kalau tutup lagi periode ini dan 97 PLTG metode 2, metode 4 itu tidak bisa dilaksanakan, jadi itu harapan kami, Pak.

Yang terakhir ucapan terima kasih kami atas nama warga Kota Ambon, Maluku bahwa dibesok hari nanti akan diadakan peresmian BNPP... (*suara tidak jelas*)... yang kemarin kita datangi. Iya BNPP kerjasama PT PLN dengan PT PAL waktu itu kan ada sejumlah opsi-opsi tapi pak waktu rapat tahun kemarin sampai dengan kita akan awal tahun ini baik Dirut PLN dan jajaran telah menyampaikan bahwa kerja sama kedua BUMN ini akhirnya disepakati menggunakan BNPP Kapal Tongkang yang kemudian bisa menjadi *floating general power plan*.

Bapak-Bapak 60 megawatt akhirnya bisa mengganti NPPV dari Turki sebesar kurang lebih 900 miliar sekian, kami mengucapkan terima kasih amat yang sangat dalam bahwa akhirnya listrik yang ada di Pulau Ambon bisa terlayani dengan baik, buat saya ini kemajuan yang sangat-sangat luar biasa. Tadi nya saya pikir bahwa itu mesin-mesin bekas pakai baik dari, dari Sulawesi Selatan maupun dari NTB, ternyata negara memberikan kami yang baru.

Sekali lagi terima kasih kami dapat ... (*suara tidak jelas*)... *power plan* ini dan besok diresmikan, kami akan hadir semua, saya ikut diundang juga dan buat saya ini memperlihatkan komitmen Pak Presiden dan Pemerintah luar biasa sekali dengan Kementerian-Kementerian dan BUMN untuk bisa menyelesaikan masalah listrik yang ada di Kota Ambon.

Yang terakhir berkaitan dengan masalah BBM, kita tidak lagi bicara panjang lebar, hari ini memang ada sedikit sejumlah masalah dalam rapat yang kemarin sejumlah usulan-usulan dan saya lihat sudah masuk di sini Pak. Kita juga minta simulasi angkanya pak karena di sini baru cuman usulan *volume*-nya pak, jadi kalau usulan *volume* keluar dengan usulan angka, kita jadi tahu totalnya harus kita perjuangkan di Badan Anggaran berapa banyak Pak? untuk tambahan solar kurang lebih 2 koma sekian juta ton sementara untuk Mitan, untuk wilayah- wilayah 3T yang belum terjadi konversi mitan ke gas kurang lebih sekitar 0,10 juta kiloliter atau 100.000 kiloliter.

Jadi kami berharap mudah-mudahan ini bisa menjawab pergumulan masyarakat kecil yang ada di bawah, sekali lagi sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya Ibu Mercy Barends dari Fraksi PDI Perjuangan tadi tentang EBT, ada komitmen dulu ya, setiap kelurahan ada 2 hektar untuk.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya Pak, jadi periode sebelumnya, itu kita punya program luar biasa sekali Pak dengan Dirjen EBT yang lama, yang namanya itu pengembangan PLTS terpadu, terintegrasi ya terpusat. Waktu itu setiap kepala desa bisa menyerahkan satu hektar tanah 1 sampai 2 hektar tanah, *integrated* nya itu kemudian dibangun Pak, di Maluku terpasang cukup banyak Pak. Jadi kalau diperiode-diperiode, diperiode ini, ini bisa dikembangkan luar biasa sekali, jadi tidak berbasis mata rumah saja tetapi juga berbasis desa. Jadi dia bisa mengangkat, mendongkrak ekonomi melampaui skala sehari-hari Pak, saya kira itu Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya itu, saya kira usulan bagus, 1 mega setiap desa kan lumayan, 1 hektar katakanlah 0,8 mega itu sudah sangat bisa mengangkat ...*(suara tidak jelas)*... termasuk BTS disitu untuk *power*. Nah mungkin karena intermitten mungkin dipikirkan bagaimana jadi *base lot* kan begitu. Ini saya kira ide yang saya kira perlu kita kembangkan kembali Pak Menteri, nanti dengan Dirjen EBTKE.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar untuk putaran kedua, ini ada.

**F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Iya Pak Mukhtarudin.

**F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VII yang saya hormati,  
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Yang pertama saya akan menyoroti terkait dengan realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 triwulan pertama dimana sudah tercapai sebesar 7,74%. Saya berikan apresiasi karena berjalan sudah diatas target dari 7,54%, iya?namun realisasi tahun, tahun triwulan pertama 2022 ini ternyata masih di bawah triwulan pertama tahun 2021 artinya kalau pun dibandingkan dengan tahun, triwulan I 21 dengan 22 masih terjadi penurunan daripada realisasi dari pencapaian persediaan anggaran.

Sedangkan tahun 2021 sebenarnya pengetatan daripada apa protokol kesehatan saya lebih ketat ya, 2022 lebih longgar, harusnya ini sudah lebih di atas dibandingkan dengan 2021 harus lebih di atas. Saya kira ini perlu ada, harus lebih mampu lagi melakukan penyerapan anggaran di tahun 2022 ini karena penting sekali penyerapan anggaran ini dalam rangka kita menggerakkan perekonomian di negara kita ini karena terus terang memang salah satu daripada pemicu, pendorong dari pada perekonomian adalah *government spending* dari belanja, belanja pemerintah lah yang bisa mendorong juga perekonomian, di samping belanja yang lain.

Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah BBM ya Pak Menteri, bahwa mungkin kita melihat bahwa akhir-akhir ini terjadi ada beberapa kelangkaan, dan antrian yang cukup panjang di beberapa daerah dan sekarang ini suata fakta yang terjadi ya, meskipun tidak merata secara nasional tapi ada beberapa daerah yang terjadi kelangkaan dan antrian cukup panjang khususnya solar. Nah, kalau kita melihat bahwa kompleksitas permasalahan inikan banyak ya.

Yang pertama memang dari sisi kuota secara nasional kita sudah *over kuota* 10 % kurang lebih ya secara nasional, secara rata. Yang kedua adalah juga terjadi penyelewengan dibawah, kan BPH Migas juga Bapak tulis adalah menemukan beberapa indikasi, temuan, penyimpangan penyelewengan ya, terus penimbunan. Nah, saya kira ini penting untuk dilakukan sebuah penindakan, pengawasan dan penindakan menjadi sebuah satu hal yang penting dalam rangka mengendalikan daripada distribusi solar bersubsidi ini, di satu sisi lain memang kuotanya sudah kurang tambah lagi ada penyelewengan, iya tambah komplekslah persoalan.

Disatu sisi lain juga terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia, Pertamina juga kesulitan *cash flow* dan juga bisa mengganggu daripada distribusinya, pengadaannya, nah sementara pemerintah sampai hari inikan belum jelas pembayaran kompensasi kepada pemerintah juga belum sehingga terjadi lah kenaikan pertamax yang berapa waktu yang lalu dari menjadi 12.500.

Saya kira ini menjadi catatan kita penting Pak Menteri untuk melakukan pengawasan. Nah, terkait dengan pengawasan ini, tadi Pak, Pak Asman Abnur juga menyinggung sedikit terkait hubungan kerja kita ke Cikampek, bahwa alangkah baiknya kita bisa lebih awal mendeteksi adanya sebuah penyelewengan artinya karena tadi ada mobil, ada 78 kali dalam satu hari bolak-balik ya untuk pengambilan dengan plat yang sama, sementara dari

pihak SPBU hanya mencatat dan melaporkan tapi alangkah baiknya ini dideteksi dengan menggunakan sistem digital ada aplikasi ya seperti aplikasi pelindung lindungi misalnya, setiap orang yang mengambil minyak misalnya ya dengan pendataan yang lebih jelas, ada *barcode*-nya begitu dia masuk mengambil, begitu ngambil lagi, dia tertolak gitu loh.

Jadi perlu ada aplikasi, aplikasi untuk mendeteksi di awal, jadi kita tidak lagi di ujung, iya pengawasan di ujung tapi di awal sudah, sudah, sudah ketahuan ini orang sudah melakukan penyelewengan kan gitu atau ada ada niat yang tidak baik untuk mengambil minyak bolak balik gitu sehingga terdeteksi dari awal. Dengan perkembangan digital saat ini, saya kira tidak, tidak ada halangan kita untuk, untuk menerapkan sistem aplikasi dalam rangka khususnya ya yang solar bersubsidi ini, khusus solar yang bersubsidi, kalau yang nggak subsidi tidak bermasalah saya kira.

Nah kedua, kenaikan pertamax itu ada migrasi ini ada orang pengguna pertamax ke pertalite. Nah, ini juga tidak bisa kita cegah karena inikan tidak mungkin kita mendeteksi, oh kamu nggak boleh pertalite, kamu harusnya pertamax, nggak ada, nggak ada, nggak ada alat kontrol kita itu untuk itu, nah sehingga ini juga menjadi persoalan kan gitu tetapi saya yakin ini hanya ibaratnya, hanya reaksi sesaatlah dari para konsumen pertamax, mungkin sekitar 20% perkiraan saya beralih ke pertalite dalam waktu ini tapi setelah itu nanti mungkin setelah melihat plus minusnya antara pertamax dan pertalite mereka akan kembali lagi ke pertamax. Sekali lagi ini reaksi, reaksi sesaat saja tetapi perlu juga diantisipasi.

Terus yang berikutnya adalah masalah fleksibilitas dalam rangka pemindahan kuota di SPBU. Kan hari ini kan SPBU itu, kuota itu kan berbasis SPBU, nah sementara SPBU yang di jalur lalu lintas yang ramai, yang padat itu kan cepat habis dan sementara SPBU yang sepi itu juga kuotanya masih banyak.

Fleksibilitas untuk memindah ini kan perlu dilakukan, diatur sedemikian rupa dari BPH Migas tentunya, dari dari Kementerian ESDM agar ada pengaturan secara tegas, tertulislah kalau, kalau ada tertulis disampaikan secara tertulis walaupun waktu hari itu dengan BPH Migas sudah boleh silahkan di koutanya digeser dari selama satu kawasan, satu provinsi silakan tapi perlu ada sebuah apa, sebuah semacam suatu yang tertulislah yang dibuat bahwa ada fleksibilitas sebagai Pertamina untuk mengalihkan dari SPBU A kurang lebih selama dalam satu wilayah itu supaya tidak terjadi kelangkaan.

Nah yang berikutnya adalah terkait dengan masalah yang disampaikan oleh Pak Sartono tadi, terkait dengan entitas khusus yang dulu sudah menjadi kesimpulan rapat kita, saya kira perlu ini ditindaklanjuti Pak Menteri karena kesimpulan rapat kita itu mengikat harus dilaksanakan oleh kita, dilaksanakan oleh pemerintah, dilaksanakan itu juga diatur dalam tatib kita di DPR wajib melaksanakan itu dan wajib melaporkan secara berkala progresnya. Oleh karena itu kita meminta Pak Menteri mau melaporkan progresnya sejauh mana sudah tindak lanjut dari pada keputusan rapat kita tentang entitas khusus terkait

dengan masalah DMO itu dan berikutnya terkait dengan masalah Lides, Pak menteri, listrik ya, listrik ini juga.

Kemarin kita juga sudah bertemu dengan Pak Dirjen Listrik, industri terkait dengan Lides di Kalimantan Tengah, iya terus terang di daerah di Kalimantan itu masih ada 400 sekian desa yang belum teraliri listrik oleh PLN ya negara kita yang sudah demikian cukup lama merdeka tetapi ternyata masih ada 400 sekian desa dari, dari 1600-an desa itu yang masih belum menikmati listrik dari, dari PLN, dari negara, oleh karena itu menjadi perhatian khusus, kalau pendekatan-pendekatan yang hanya seperti normatif hari ini mungkin sampai 2050 mungkin Kalimantan dan Kalimantan Tengah itu baru, baru selesai urusan Lides nya karena terus terang kayak kemarin PLN dapat PMN 5 triliun, dari 5 triliun itu 2, hampir 2 triliun dan hampir 50% digunakan untuk Lides tetapi alokasinya ya, alokasinya ini masih belum maksimal.

Nah oleh karena itu perlu ada pendekatan kita bersama-sama agar Lides ini secara nasional bisa tuntas lah sebelum, sampai tahun 2024 berapa biayanya, mari kita itung-itungan dan mari kita perjuangkan bersama tetapi ini adalah hak dari pada, hak warga negara, hak warga negara seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati listrik ini sementara Lides ini hanya melewati apa, apa namanya dari dananya adalah dari PMN. Kalau menurut PMN setiap 5 triliun saja setiap tahun, kapan Lides secara nasional ini bisa selesai.

Saya kira perlu ada terobosan Pak Menteri. Iya belajar bicarakan dengan pak Presiden dalam Ratas, kaitan ini kepentingan keadilan kita dalam keadilan terhadap masyarakat kita khusus Kaltim aja 400, belum lagi daerah lain ya, belum lagi Kalimantan Utara, belum lagi yang seperti Mbak Mercy tadi bilang. Jadi masih banyak sekali yang perlu mendapat perhatian kita terkait bahwa agar rakyat kita ini bisa menikmati listrik dari negara ini.

Yang terakhir terkait dengan masalah aspirasi daerah listrik desa dan masalah konversi dari minyak tanah ke gas. Ada beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah itu juga belum terakomodir, minyak tanahnya sudah tiada lagi ya, iya tidak ada lagi alokasi ke sana tetapi LPG-nya juga belum, belum masuk. Nah oleh karena ini, ini menjadi perhatian, saya serius nanti bersurat, nanti akan saya sampaikan setelah rapat, surat secara resmi kepada Pak Menteri agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti, terima kasih

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Yang terhormat Pak Mukhtarudin dari Dapil Kalimantan Tengah dengan berbagai persoalan tadi yang telah dikemukakan termasuk bagaimana *affirmative action* dalam Lides (Listrik Desa). Jadi juga termasuk dan bagaimana mekanisme pengawasan di SPBU dengan deteksi dini dan seterusnya.

Dilanjutkan dipersilakan dari Fraksi Partai Gerindra.

Tadi masih pass sekarang ada Pak Bambang, kalau memang mau memanfaatkan sekalian.

Pak Bambang yang terhormat dipersilakan.

**F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):**

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang juga saya hormati seluruh Anggota Komisi VII yang hadir fisik maupun *virtual*,

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon I nya,  
Dan juga ada Ibu Dirut Pertamina,  
Pak Kepala SKK.

Pertama diagenda rapat kali ini kan kita ingin mendapat paparan ya dan laporan terhadap realisasi anggaran 2022 triwulan I Pak, nah kenapa kami minta itu, karena kami ingin mengetahui karena sebentar lagi masa sidang besok kita sudah mulai membicarakan pagu indikatif awal untuk anggaran 23, kita reses mulai besok, mulai lusa tapi masa sidang sidang depan sudah mulai.

Nah, kami meminta kepada Sekretariat agar diberikan ini paparan terkait realisasi selama triwulan I-nya bahkan kami tegaskan kami minta satuan tiga berapa sih belanja barang, belanja jasa, belanja modal, terus berapa target yang sudah dicapai? terus kendalanya apa, kami disini belum menemukan, berapa. Dari belanja pengadaan barang misalnya kan, ini prosesnya sampai sekian, belanja jasanya, belanja rutinnya, kami nggak, kami hanya diberikan masih satuan dua kan, masih berbicara judul besarnya padahal satuan tiga, itu sudah mengacu kepada nama pekerjaan yang dimaksud.

Masa kami harus melihat di LPSE Pak, masa kami harus detil satu-satu oh ini proses lelang, oh ini proses masa sanggah, kami nggak menginginkan itu. Kami menginginkan secara keseluruhan dipaparkan ini loh Pak pengadaan barangnya sampai sini, ini ada persoalan, ada masih sanggahan atau ada apa, kan begitu loh, oh iya ini yang sudah berkontrak, target kita selesai sekian bulan, nah ini. Kami, kami yang dapat masih belum ini Pak, itu satu terkait ini mungkin dari kesekjenan Pak Menteri, ini hanya sekedar buat ke depan karena ke depan kita biar gampang untuk memperjuangkan lagi.

Kami kemarin berjuang mendapatkan 850, meyakinkan Badan Anggaran agar mendapatkan tambahan mitra-mitra kami, kan. *Alhamdulillah* karena perjuangan teman-teman baik di komisi maupun di Badan Anggaran, akhirnya kita bisa meyakinkan Dirjen Anggaran bahwa Kementerian ESDM perlu tambahan yang cukup banyaklah, akhirnya disetujui 850, maka itu kami harus pertanggungjawabkan. Memang betul putusan Mahkamah Konstitusi terkait DPR dilarang untuk masuk ke dalam satuan tiga tapi itu di dalam proses penyusunan Pak, tapi kalau fungsi kami, fungsi pengawasan kami boleh kalau

kami enggak tahu satuan tiganya gimana kami mau mengawasinya. Kalau menyusunnya iya betul putusan MK tegas bahwa dalam proses pembahasan APBN dilarang kita masuk ke dalam satuan tiga tapi pasca 30 hari setelah APBN disetujui oleh dan diparipurnakan, kami punya hak untuk mengawasi, realisasi, ini udah lebih dari 60 hari, iya kan, dari ini kan, jadi kami mohon supaya kami diberikan secara detail.

Terus yang kedua terkait ini Pak, kemarin beberapa hari yang lalu mungkin Pak Dirjen Minerba mondar-mandir ke sini kan, masalah entitas, masalah carut-marutnya apa namanya pencabutan 2.078 itu sekarang udah mulai banyak keberatan Pak, kan. Nah itu kami diskusikan dengan Pak Dirjen. Nah kebetulan ini ada Pak Menteri sekalian biar kita saling memahami semua kan, bagaimana kebijakan Pak Menteri ke depan terkait yang keberatan-keberatan tersebut kan, karena teman-teman kemarin mempersoalkan juga masalah keberadaan Kementerian Investasi yang menerbitkan izin, di anggap bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.

Nah di dalam 2.078 itu kami juga menemukan ada hal-hal yang unik juga ada orang yang sudah mendapat RAKB di *take down* terus habis gitu akhirnya iya karena masuk di dalam 2.070 sekian 78 itu kan. Ada juga yang orang sudah apa namanya mengajukan RAKB juga di *take down* dan ada juga yang pailit, ini unik, Pak. Ada yang pailit, kita ini mengadu ada perintah pengadilan tapi di ESDM nggak boleh tapi ini berbanding terbalik ada satu perusahaan ini malah dapat. Ini, ini saya kemarin sempat bertanya karena kami dapat laporan dari suatu LSM masuk di dalam sekretariat.

Kami tadi baca, pelajaran ini ada namanya PT Batuah Energi Prima mendapatkan RAKB sekitar 2 juta metrik ton padahal dia 2018 dinyatakan pailit, ini aneh nih bahkan ada penolakan dari Kementerian ESDM 2021, awal 2021 untuk masuk ke...(suara tidak jelas)...ditolak namun karena RAKB nya persetujuan dari provinsi, nah ini kan. Ini yang kita harus ini dalam Pak karena ada perusahaan lain yang mengalami hal yang sama tidak bisa bahkan dicabut, nah ini kenapa? Ketika sudah dari 2018, ke 2000 sekarang 2022 kenapa tidak ada *punishment* yang jelas, bahkan kami mendapat laporan, ini malah mendapatkan RAKP katanya. Kita harus telusuri ini, dari 2018 benar nggak ini perusahaan sudah menjalankan rekomendasi dari Dirjen Minerba bahwa dilarang melakukan aktivitas ini.

Ini bukan hal kecil, 2 juta metrik ton, berapa pendapatan negara yang harus didapatkan kalau itu berjalan sesuai. Tapi kenyataannya bahwa ini perusahaan PT Batuah, saya ulang lagi PT Batuah Energi Prima kami akan minta pendalaman. Mungkin entar di Panja *Illegal Mining* Pak Edi, iya, kita akan dalam gimana prosesnya selama 2018 ke 2021 dulu Pak, walaupun misalnya di ujung 2022 udah dicabut kepailitannya, kita tidak persoalkan tapi di 2018 ke 21, ini yang harus kita dalam, jangan sampai ini kita mendapat laporan bahwa ini melakukan penambangan tanpa RAKB bahkan Pak Dirjen sendiri sudah mengeluarkan larangan kan, ini yang tanda tangan sebelum Ibu Lana soalnya kan gitu, nah itu Pak Menteri.

Ini salah satu yang kami ingin mendalami ke depan Pak Menteri bisa jelaskan, bagaimana proses-proses pencabutan izin terhadap perusahaan yang memang sudah terindikasi pailit, sudah jelas-jelas kan, sudah jelas-jelas bahkan Pak Dirjen ini sangat tegas, kalau yang pailit nggak boleh tapi selama sebelum proses ini jauh banget soalnya ini 2018 ke-21, Pak. Ada sekitar 4 tahun, infonya ini masih beroperasi. Kami akan telusuri ke lapangan, kami akan cek siapa sih di belakang orang-orang ini, sehingga begitu hebatnya, begitu dahsyatnya mereka bisa melakukan operasi tanpa perizinan dari Dirjen Minerba dan bahkan yang seharusnya sudah bisa dicabut tanpa pertimbangan ini kan masih bisa eksis di sini. Mungkin itu Pak Dirjen hanya sedikit dari saya Pak Menteri.

Jadi ada dua hal yang kami ini, yang pertama adalah terkait anggaran, kita satuan tiganya kita minta ke depan lebih jelas lagi Pak karena biar kami bisa tahu Pak, apa sih masalahnya di ini kan, karena buat kami itu 7% triwulan pertama itu kecil Pak, harapan kami sih bisa terserap 100% karena kita berjuang minta.

Dulu kita ingat Pak Sekjen, Pak Menteri, semua kan, Pak Irjen pengen minta tambahan, masa di ketika ditambahin malah nggak mau digunain. Nah harapan kita di triwulan ke dua semester satu, ESDM bisa menyerap lebih dari 50%, nah karena kita bulan depan sudah mulai pembahasan dan untuk Pak Dirjen Minerba terkait persoalan-persoalan, iya kan, tolong digaris bawahi, PT ini akan kami telusuri secara detail. Saya akan berkoordinasi sesama Pimpinan di Panja *Illegal Mining* beserta teman-teman Komisi VII yang gak ada di Panja *Illegal Mining* untuk menelusuri keberadaan PT ini. Terima kasih Pak Menteri.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Fraksi Partai Gerindra Pak Bambang Haryadi sekaligus juga, Pimpinan.

Tadi menggaris bawahi beberapa hal tentang termasuk tata kelola di Minerba pencabutan, justru malah ada yang dapat dan sebagainya, ini menjadi perhatian yang sangat, sangat serius.

Selanjutnya dipersilakan dari Fraksi Nasdem, kalau masih ada? Kalau tidak saya mungkin atas izin pimpinan dan anggota, saya memanfaatkan ini untuk menggaris bawahi beberapa hal, saya mau nanya Pak Menteri, bagaimana ini mumpung ada Pertamina, PLN hadir nggak ya? Dirut PLN hadir di *virtual*?

**DIRUT PLN :**

Siap Pak Ketua. Kami hadir Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Nah kalau nggak ya bisa dicabut hak preogratifnya.

**DIRUT PLN :**

Siap Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Oke jadi begini tentang berbagai hal yang sudah kita rapatkan waktu lalu perihal misalnya untuk Pertamina, bagaimana tadi digaris bawahi juga oleh Pak Mukhtarudin, piutang Pertamina terhadap negara, terhadap pemerintah kurang lebih di *carry over* 100 triliun. Kita akan sama-sama juga ingin menyelamatkan Pertamina, persoalan *cash flow* dan seterusnya, dan seterusnya karena *cash flow* Pertamina berakibat panjang, salah satunya juga di hulu.

Saya tahu sekarang di hulu Pertamina juga mulai megap-megap, karena apa? *Lifting* mulai turun di dalam 3-4 hari terakhir, bulan terakhir mungkin tolong dikoreksi sudah di bawah 600.000 barel per hari ini, maaf di bawah 700.000 barel perhari maksudnya, sudah 600-an dan sebagainya, ini kan sangat-sangat memperhatikan, berdampak semuanya.

Terlebih-lebih juga menyangkut tentang harga yang ditentukan dari ICP yang memang sudah senjang. Lagi-lagi pertalite, pertamax yang menjadi konsen kita, pertamax naik tapi tetap subsidi meskipun itu adalah barang nonsubsidi. Ini hal-hal kayak gini, saya kira perlu dituntaskan Pak Menteri dan sekali lagi kita tidak menyalahkan semuanya supaya juga Presiden, saya menggaris bawahi, waktu itu juga agak, menurut hemat kita *miss* lah ngomong apa, bahwa padahal nama pertamax itu kan BBM tidak bersubsidi bahkan Presiden tahun 2015 barang tidak bersubsidi itu masih bisa naik sesuai dengan harga pasar, kan sampai gitu. Nah tetapi lagi-lagi ingatan presiden semata-mata untuk menimbulkan empati kita bersama, oke. Jadi itu Pak Menteri perihal tentang bagaimana yang ditanggung oleh Pertamina sekaitan dengan selisih-selisih baik dari harga karena ICP maupun dari harga dunia.

Kedua, tadi soal tata kelola pertambangan, saya kira betul Pak, ini ada Pak Dirjen, ini menimbulkan heboh yang luar biasa. Jadi kredibilitas Kementerian ESDM sangat tidak punya kredibilitas karena apa, Satgasnya lantas yang sangat dominan dan seterusnya, ini kan antara apa yang ada dikonsep, apa yang di realitas kan berbeda, dengan mudahnya, dengan mohon maaf, saya menemukan berbagai kasus, apa itu dengan sering mudahnya Menteri BKPM misalnya, mencabut, kalau nggak, mana yang ini, mana yang itu tapi juga mana yang perlu dihidupkan dengan komunikasi di luar agak *down grade* institusi kita kementerian sebagai apa pengampu utama bahkan karena Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 jelas bahwa Minerba itu adalah ESDM dengan berbagai syarat dicabut dan, dan sebagainya, iya karena ada satgas lantas yang dominan sekarang adalah Bahlil, Pak Bahlil, kita betul? Jadi menteri investasi ini, Menteri Investasi Politik, jadi ini juga penting, juga digaris bawahi. Kita ingin menegakkan tata kelola yang benar, sesuai dengan Undang-undang, saya kira itu. Nah, inikan juga ada wartawan bisa dikutiplah bahwa kita

semuanya prihatin dengan tata kelola yang sekarang ini boleh dikata melanggar undang-undang bahkan. Iya jadi itu dua hal saja dari kami, saya kembalikan sekarang ke Fraksi PKB, mana PKB?

**F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.) :**

Iya PKB izin.

**KETUA RAPAT:**

Iya Pak Syaikhul dipersilakan yang terhormat.

**F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.) :**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

**F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.) :**

Pimpinan, dan;

Anggota Komisi VII yang saya hormati;

Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati, saya banggakan.

Menambah dari yang sudah disampaikan sahabat-sahabat, yang pertama saya ingin menyoroti soal pengaruh eskalasi geopolitik terhadap harga BBM. Jadi memang diakui atau tidak kita inikan sudah krisis Pak, karena antara lifting dan kebutuhan kita itu sudah jauh, sudah jauh sekali. Kita lihat bagaimana repotnya negara-negara Eropa itu hari ini ketika ada masalah dengan Rusia dan hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi pada Indonesia karena memang wilayah-wilayah yang menghasilkan migas itu cenderung dekat dengan konflik.

Nah, saya ingin menyampaikan usulan saja sebenarnya yang perlu kita dorong adalah soal eksplorasi migas nonkonvensional Pak. Inikan sudah lama sebenarnya jadi pembicaraan tapi kok realisasinya kayaknya lambat sekali. Jadi saya usul begini konkrit, Bapak beserta jajaran Bapak, ini mengundang perusahaan-perusahaan yang memang ahli di bidang migas nonkonvensional untuk masuk di wilayah kerja konvensional, jadi supaya di, nggak usah lelang WIKA baru, apa gitu masih lama, terlalu lama.

Jadi secepat-cepatnya diundang bekerjasama dengan pemegang WIKA itu untuk melakukan eksplorasi migas non konvensional karena kita ini kalau rapat dengan SKK Migas itu pasti hanya diberi gula-gula saja, akan sekian apa sekian puluh juta pasti sejuta gitu. Itukan cuman bahasa-bahasa *lip service* aja, kenyataannya kan sama, ini masih sama EOA, apalagi percepatan lelang, apa ini, udah bosen kita dengar begini, Pak. Jadi saya usul kita memang harus keluar dari krisis ini, kalau memang BBM dari fosil itu masih dibutuhkan, iya

mau nggak mau harus masuk ke yang nonkonvensional supaya cepat saja, itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan pengawasan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi. Saya sebenarnya salut ya dengan Pak Menteri yang mau sidak turun di SPBU-SPBU, ini DPR aja kalau nggak kunker, nggak ke SPBU Pak untuk isi bensin. Nah cuman begini, SPBU inikan jumlahnya 5.000 lebih seluruh Indonesia, mungkin Bapak dan tim Bapak hanya bisa menjangkau berapa persen kalau melakukan sidak. Maka yang tidak bisa dihindari adalah penggunaan teknologi.

Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukhtarudin, saya juga ingin penasaran ini dengan Pertamina, Pertamina, satu atau dua tahun yang lalu, ini lagi gencar-gencarnya tentang digitalisasi SPBU tapi saya nggak tahu sekarang progressnya sampai di mana, ini nanti tolong disampaikan.

Maksud saya ada 1 ya, 1 hal yang berbau dengan digitalisasi itu, yang mau nggak mau harus segera di realisasikan yaitu penggunaan CCTV. Jadi pemasangan CCTV di setiap SPBU untuk apa? Untuk mendeteksi itu penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Mungkin ada kendaraan yang dimodifikasi atau kendaraan yang bolak-balik atau kendaraan yang semestinya nggak ngisi subsidi, dia isi yang subsidi dan seterusnya itu, dan saya dulu pernah dengar juga kalau Pertamina memang ada arah kesana tetapi saya nggak tahu progressnya sekarang sampai di mana?

Saya kira 5.000 nggak banyak juga kalau mau dipasang CCTV kan termasuk untuk melihat antrian, itukan juga bisa kalau kita punya CCTV di setiap SPBU, nggak harus Pak Menteri sidak ke SPBU. Nah, ini mohon dipikirkan, entah nanti anggarannya itu apakah dari Pertamina atau dari SPBU-nya atau dari kementerian mungkin atau dari BPH Migas juga bisa. Yang mana saja yang penting ada proses itu, jadi digitalisasi di SPBU menggunakan CCTV, karena kalau kita bicara berita tentang penyelewengan SPBU itu pasti sudah basi, sudah dikepolisian sekian bulan baru diproses, itu kan apa ya? Sebenarnya kita ini, boleh jadi kita ini ngawasin cuma lucu-lucuan saja gitu loh.

Terus terkait apa namanya pihak-pihak yang menyalahgunakan, itu juga sekarang ada kemajuan Kementerian Perindustrian mau menindak industri yang menggunakan BBM bersubsidi, itu sudah oke tapi yang tidak kalah penting SPBU-nya kalau melakukan penyelewengan harus ditindak karena kemungkinan besar kalau penyelewengan itu pasti ada persekongkolan atau dengan sepengetahuan. Kan kita nggak pernah melihat ada mungkin, ada SPBU yang ditutup sekian bulan karena menjual atau menyelewengkan BBM bersubsidi, belum pernah, nah ini tolong nanti Ibu Dirut juga perlu dipikirkan. Jadi kita juga perlu menindak SPBU-nya, kenapa itu bisa terjadi penyelewengan di situ? Karena selama inikan kita menyalahkan orang dari luar kemudian dilimpahkan ke kepolisian dan hasilnya begitu-begitu aja.

Saya kira itu mungkin ini tadi, tadi juga ditegaskan sama kawan-kawan terkait pengawasan yang memang kita selama ini kesannya itu, iya itu seperti lucu-lucuan saja. Ini dua, dua hal itu saya kira yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq.  
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Gus Syaikhul Islam dari Fraksi PKB, pakai jas biru Pak Syaikhul iya, iya kita mau melihat rapinya itu bukan persoalan.

Iya dilanjutkan Fraksi, setelah PKB ya, Demokrat, nah Pak Hendrik dipersilakan yang terhormat.

**F-PD (Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.);**

Terima kasih, Ketua.

Yang terhormat Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VII,  
Serta Mitra Kerja Komisi VII,  
Pak Menteri,  
Pak Sekjen,  
Pak Dirjen, dan  
Ibu Dirut, dan  
Pak Cipto.

Pertanyaan saya pertama, saya apresiasi Pak Menteri kemarin masuk ke dapil saya, iya dapil saya itu Medan, Deli Serdang, Sergi Tebing, Pak Menteri dan saya baca di media ada temuan-temuan cuman sayangnya waktu kunjungan Anggota Komisi VII itu nggak diundang itu, itu yang menjadi persoalan, nah gitu.

Jadi padahal sebenarnya Pak Menteri penyelewengan ini lebih banyak saya tahu dari mungkin dari Pak Menteri gitulah karena itu daerah saya karena daerah saya itu banyak industri. Iya jadi saya kira kalau ke depannya, kalau ada kunjungan-kunjungan Pak Menteri maupun Ibu Dirut ya boleh mengundang kita Anggota Komisi VII dan juga memang Pak Menteri saya tahu SMA nya di Medan ya? Tadi saya baru tahu juga? Jadi sama-sama anak Medan kita Pak Menteri ya? iya.

Berikutnya Pak Menteri, saya mohon juga untuk di dapil saya Jargasnya ditingkatkan Pak Menteri, Jargas itu saya kira perlu di Sumut dan saya dapat temuan bahwa sosialisasi Jargas ini melambat ya jadi perlu ditingkatkan karena ada miskomunikasi di bawah terkait dengan abodemen itu dikiranya pakai abodemen gitu Pak, jadi Jargasnya tolong disosialisasikan lebih ditingkatkan.

Saya mau ada usulan Pak Menteri terkait dengan untuk mencegah penyelewengan subsidi, iya soal subsidi Pak. Saya usulkan BPH Migas atau siapapun terkait dengan solar subsidi ini bisalah bekerjasama dengan Dirjen Pajak supaya kita lebih tahu industri-industri yang menggunakan BBM-nya.

Jadi saya kira Dirjen Pajak pasti lebih tahu, industri tersebut dia menggunakan solar siapa? Jadi bisa, saya kira kita bisa dapat temuan di sana kalau mereka menggunakan solar subsidi, jadi kita tahu sumber BBM mereka dari mana? Jadi saya kira Dirjen Pajak bisa untuk bisa meneropong seperti itu.

Berikutnya terkait DME, saya lihat disini Pak Menteri ada soal DME, dan kemarin kita juga udah FGD dengan Bukit Asam terkait dengan DME. Saya perlu tahu dan jelas, DME ini nanti produk siapa Pak? Iya karena setahu saya tadi kemarin kita ke Bukit Asam itu apanya dari hulunya ada *air product* dan Pertamina sebagai *off take* nya, *off taker* nya. Nah sekarang DME itu produk siapa Pak? Dan nanti *invoice*, *invoice* nya ke mana kalau misalnya Pertamina menggunakan DME? Nah ini saya yang saya belum, belum saya tahu itu Pak, kemarin juga dari Bukit Asam saya belum jelas juga, DME ini produk siapa sebenarnya? Nah ini juga pingin penjelasan Pak Menteri.

Yang terakhir kita tahu memang produksi minyak sekarang udah menurun ya? saya melihat bahwa Masela dan Chevron Id, kenapa berhenti? Iya harusnya Masela itu Chevron Id itu 2027 sudah pisah? Apakah akan bisa tercapai itu nanti Pak? Dan juga kita mau tahu SDM nya apa programnya untuk mencari investor Pak? Karena ini kan perlu juga, kita mencari investor dari luar negeri.

Saya kira gitu Pak Menteri sama-sama anak Medan kita, Horas Pak Menteri, Iya.

**KETUA RAPAT:**

Iya, luar biasa Pak Hendrik Sitompul, jadi tadi Pak.

Hah Siahaan apa Sitompul?

**F-PD (Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M.);**

Sitompul, Sitompul, Sitompul, Hendrik Sitompul.

**KETUA RAPAT:**

Hendrik Sitompul.

Jadi tadi menggaris bawahi ketika apa sidak *mbok yao* lagi lagi melibatkan Komisi VII. Iya jadi karena tadi beliau lebih tahu, kebetulan informasi beliau juga pelaku usaha di bidang penyaluran BBM, jadi nah kan?

**ANGGOTA KOMISI VII :**

Agen ya? Agen Pimpinan?

**KETUA RAPAT:**

Iya, jadi. Oh iya sebelum kita lanjutkan, kita perpanjang dulu ya sampai pukul berapa sepatat? Pukul 14 lewat, eh maaf 13 lewat 40? Begitu ya? Iya biar 1/2 jam.

**(RAPAT : SETUJU**

Baiklah dilanjutkan setelah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai PKS; dipersilahkan yang terhormat Ibu Diah.

Diah atau Dian?

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Diah betul Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Diah, betul kok ini.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Iya terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan, dan;

Seluruh teman-teman Anggota Komisi VII, kalau tadi PKB berbaju biru, saya berbaju hijau ini Mbak Ratna, *green energy*, banyak lagi berbaju hijau ini Komisi VII,

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran.

Saya Diah Nurwitasari Pak, dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Jawa Barat II Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat.

Tadi sudah banyak dibahas ya Pak ya, dampak dari kenaikan harga migas secara global. Kami juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah untuk upaya penambahan kuota, baik terkait dengan pertalite, solar dan lain-lain karena memang di situlah kami melihat salah satu tugas ataupun fungsi negara menjadi regulator dan berupaya untuk memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Yang kami juga ingin soroti itu adalah terkait dengan pengawasan Pak sama ya, dan ini bukan hanya pada BBM, termasuk kepada LPG, Pak.

Jadi kita sering di apa, di berikan satu data bahwa mayoritas pengguna LPG bersubsidi ini kan angkanya sampai dengan di atas 90%, sekarang dengan naiknya harga LPG yang nonsubsidi, ini terjadi *shifting* juga. Jadi bukan hanya kemarin dari pertamax ke pertalite kalau kemarin bahkan dari pihak Pertamina mengatakan *shifting* dari pertamax ke pertalite itu sekitar 30 sampai 40% meskipun tadi diprediksi mungkin tidak lama tapi untuk LPG ini Pak, ini juga perlu ada satu pengawasan karena itu tadi sifatnya adalah subsidi.

Nah, berkaitan dengan rencana-rencana baik jangka pendek, menengah maupun panjang, saya juga butuh penjelasan Pak, yang dimaksud jangka menengah itu dalam jangka waktu berapa lama? Karena jangan sampai kita punya beda persepsi, kami menganggap jangka menengah itu adalah 5 tahun, nggak taunya 2 bulan berikutnya sudah terjadi prosesnya gitu. Iya karena di sana misalnya ada penyesuaian harga pertalite itu di dan LPG misalnya 3 kg masuk kedalam kategori jangka menengah dan jangka panjang tapi ini berapa lama ini gitu ya. Artinya karena kita perlu dengan sangat cermat mengkaji perubahan harga terkait dengan LPG 3 kg maupun juga dengan pertalite. Iya karena pertalite sekarang sudah menjadi satu konsumsi yang umum sekarang gitu ya bahkan mungkin di beberapa tempat pertalite menjadi langka akhirnya orang terpaksa pindah ke pertamax itu ya.

Nah, ini saya hanya ingin juga mengingatkan Pak, bahwa saat ini ketika kita berbicara kelas menengah itu sebetulnya ada disparitas yang cukup jauh juga di kelas menengah ini karena terdapat sejumlah kelas menengah sebelum pandemi, iya dia masuk dikelas menengah tapi bagian bawah yang ketika terjadi pandemi, mereka yang kelas menengah ini sudah pindah kelas sebetulnya yang biasanya rutin dapat penghasilan misalnya di atas UMR tiba-tiba di PHK, tiba-tiba misalnya kantornya tutup dulu sekian bulan nggak ada penghasilan atau pengurangan dari pendapatan-pendapatan mereka, jadi kelas menengah yang ditepian-tepian ini Pak, ini sekarang juga turun.

Jadi kalau kita membahasakan bahwa nonsubsidi itu, itu kan untuk kelas menengah atas, menengah atas sebetulnya banyak kelas menengah yang mungkin secara statistik dulu itu masuk betul di *range* pendapatan yang apa namanya bisa mendapat membayar BBM yang nonsubsidi tetapi pada hari ini, lapisan kelas menengah ini, kelihatannya perlu ada satu apakah kerjasama dengan BPS atau apapun untuk meneliti seberapa banyak sih perpindahan kelompok ini gitu, karena nanti ini terkait juga dengan konsumsi ya, saya kira itu yang perlu kita cermati.

Kemudian saya juga mendorong apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap Pertamina ya, karena kita tidak mungkin hanya memberikan tugas tanpa juga memberikan *support* yang kuat juga terhadap apa yang di tugaskan pada Pertamina tersebut. Pertanyaan saya selanjutnya Pak masih di LPG 3 kg karena bahasanya menarik yaitu di dalam yang di halaman 11 itu Pak, penyesuaian formula LPG 3 kg. Kalau orang teknik berbicara formula LPG 3 kg itu apa formula kandungannya atau formula harga atau formula apa ini Pak yang mau disesuaikan ini, dan ini akan dilakukan jangka pendek masalahnya gitu. Jadi jangan sampai tadi Pak, *black box* atau yang saya pahami dengan yang bapak pahami itu menjadi berbeda kita gitu ya, yang dimaksud dengan penyesuaian formula ini seperti apa.

Yang selanjutnya terkait dengan energi Pak Menteri, saya saat mendorong sebetulnya pengembangan jaringan gas ya, terkait dengan potensi gas Indonesia yang luar biasa artinya keseriusan kita dalam rangka apa namanya menekan juga pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita alihkan ke

gas, iya dibandingkan dengan energi fosil misalnya dan lain-lain, ini Jargas ini penting tapi buat saya itu menarik Pak. Menariknya apa? Target di sini luar biasa disebutkan ke depan diharapkan untuk gas itu 1 juta rumah tangga per tahun. Cuma lagi-lagi disimpannya di kolom jangka menengah, jangka panjang yang saya nggak tahu ini panjangnya sepanjang apa, karena apa? Kalau melihat anggaran 2022 hanya dialokasikan 40.000. Jadi kayaknya untuk target 1 juta, sekarang aja hanya 40.000 ini mau berapa lama di raih gitu. Nggak apa ya bahkan menurut saya kalau 40.000 setahun skala Indonesia ini angka main-main Pak, main-main untuk keseriusan kita melakukan pengembangan jaringan gas karena skalanya Indonesia Pak, gitu ya, kalau skalanya mungkin kota gitu angka 40.000 masih bisa dimengerti tapi kalau skala Indonesia, saya kira ini persoalan serius target sejuta per tahun, ini lompat dari 40.000 ke 1.000.000 itu kan bukan sulap Pak, nah ini butuh kejelasan *roadmapnya* itu seperti apa, *planning* nya seperti apa, sehingga target-target yang sudah dicanangkan itu bisa dicapai.

Yang selanjutnya lagi terakhir Pak Menteri, lagi-lagi soal data, ketika kita memberikan misalkan subsidi berarti kita juga harus berbasis data yang jelas, ketika kita kemudian misalkan mau tadi membantu rumah tangga untuk mendapatkan jaringan listrik, menggunakan data DTKS di Komisi VII sudah sangat sering ya, bagaimana kita menguatkan akurasi DTKS mungkin khususnya terkait dengan kelistrikan karena saking seringnya tidak akurat data di lapangan, jadi data perbaikan data itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ibu Diah dari Fraksi PKS.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANDI PARIS, M.Sc.) :**

Dari PAN, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya selanjutnya dari Fraksi PAN tadi sudah mohon maaf Bu Andi karena sudah daftar duluan, ada Pak Nasril tadi yang sudah mengajukan dan juga Pak apa? Pak apa? Pak Edi, Pak Edi. Tadi sudah, nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi.

**ANGGOTA KOMISI VII :**

Silakan, Ibu Kapoksi dulu, Pak.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANDI PARIS, M.Sc.) :**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Iya, tapi mohon waktu Bu *anu* ya, Bu Andi ya.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANDI PARIS, M.Sc.) :**

Saya sedikit saja, Pak Menteri dan Pak Sekjen, seluruh jajaran dan terkhusus Pimpinan yang ada di depan, semoga sehat semuanya.

Mohon maaf, saya terlambat karena saya baru turun dari pesawat langsung ke sini karena tujuannya adalah sebenarnya mau memeriksa juga tuh program hasil temuannya Pak Dirjen seperti apa dan saya mau buktikan di lapangan, ya. Dan pertama Pak catatan, dari Bu Diah soal Jargas itu penting kalau ingin kita mencapai berapa juta.

Kedua, kami kemarin dengan Dirjen Migas, Komisi VII berkunjung memantau ke Sulawesi Selatan memantau persediaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mungkin perlu segera dibuat aturan Pak Menteri bagaimana mobil-mobil kita tahu pertalite itu kan subsidi tetapi kalau kita bikin penelitian berapa mobil mewah yang memakai pertamax, itu bisa dikatakan itu sedikit sekali angkanya. Ini perlu aturan yang sangat jelas bahwa pertalite itu digunakan untuk, memang sudah ada aturan jenis-jenis kendaraannya, tapi juga harus ada aturan yang lain yang, yang memaksa agar mobil-mobil mewah yang sebenarnya dipabrikannya sudah tertulis kalau kita buka itu dia harus menggunakan Ron 92 misalnya tapi masih menggunakan pertalite, kita tanya alasannya apa? murah tapi kan gak bisa begini, negara rugi terus kalau mensubsidi.

Kedua, saya punya pertanyaan nanti dijawab tertulis, di sini misalnya selalu minta anggaran untuk pelayanan publik lainnya ya, misalnya pagunya 33 tapi di sini ada layanan ini, layanan ini, yang juga ada anggarannya, nah pertanyaan saya jangan sampai ini *redundant*. Harusnya kan pelayanan publik itu menghasilkan uang penerimaan untuk negara BLU itu, nah bagaimana tidak menjadi sekedar *cost*.

Kemudian ketiga Pak, di sini Bapak menulis *converter* 30.000 Pak paket, 30.000 paket tapi nyatanya sebenarnya tidak 30.000 paket Pak, nyatanya 20.000 kalau memang ternyata Bapak tulis 30.000 dan dibeli barangnya 20.000, uang 10.000-nya itu ke mana, Pak? Itu bisa jadi temuan itu bisa saya laporkan ke KPK itu. Kalau memang 20.000, 20.000 Pak Menteri tulis di sini tapi kalau katanya menurutnya ada bintang, saya cari-cari bintangnya mana? Kalau memang di bintang, padahal dalam salah satu kesimpulan Rapat kita dengan Pak Menteri, Pak Menteri tanda tangan bahwa kegiatan yang terkait dengan masyarakat itu walaupun terjadi *refocusing* jangan, jangan kegiatan itu. Itu Bapak tanda tangan adalah satu kesimpulan Rapat, yang lain lah Pak yang tidak berdampak pada masyarakat.

Ketiga, saya juga terakhir minta Kementerian ESDM ini profesional dalam program-program untuk masyarakat misalnya untuk meteran listrik, jangan misalnya awalnya minta sekian datanya terus belakangan minta data ini, minta data ini, harus 40 meter, harus minta ini surat keterangan kepala desa, itu kan namanya nyusahin kita Pak, iya? Jadi tolong dari awal *firm*. Itu juga terkait dengan misalnya, misalnya ini untuk pompa dan mesin nelayan, itu awalnya datanya begini, nanti belakangan minta data ini, minta surat ini, minta surat ini, harus sekian jam dari laut, tidak bermalam, saya bilang siapa yang mau tongkrongin itu? nah berartikan mohon maaf saya WA Pak Irjen loh pakai logika loh kalau... (*suara tidak jelas*)... nggak mungkin dia nginep dilaut, iya kan? jadi maksud saya jangan selalu menambah-nambah terus dokumen yang diminta yang menyebabkan masalah gitu loh Pak.

Lucunya lagi Pak, sudah, sudah dikembalikan data disuruh lengkapin, belakangan disuruh potong gitu loh, iya kan? Ini buat bukan buat saya saja Pak tapi mustinya teman-teman juga merasakan, seperti, seperti itu maksudnya kita bekerja secara profesional supaya kita juga nggak malu ya Pak ya di, di belakang bahwa apa namanya kita betul-betul, betul-betul kita profesional baik DPR maupun juga Bapak-bapak, terima kasih Pimpinan.

*Wassalammualaikum.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Tadi digaris bawahi pentingnya tadi Pak Menteri tentang konsistensi apa yang direncanakan dengan apa yang direalisasikan. Selanjutnya saya kira PPP tidak hadir. Kita kembali ke meja Pimpinan, ini hadir Pak Maman dan juga tadi Pak Bambang sudah, nanti setelah Pak Maman adalah Pak Edi.

Dipersilakan yang terhormat Pak Maman.

**F-PG/WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang.  
Salam sejahtera.

Selamat siang Pak Menteri beserta dengan rombongan;  
Hadir juga ada Pak Dwi, dan;  
Ada Bu Mike dan Bu Erika dan seluruh jajaran Eselon I Kementerian ESDM.

Yang pertama, saya bicara mengenai karena memang ada agenda pembahasan terkait realisasi anggaran, saran saya Pimpinan nanti pembahasan tentang satuan tiga dan lain sebagainya dibahas di agenda rapat yang lebih teknik saja, jadi tidak perlu terlalu diperdebatkan di sini. Saya pikir

secara *overall* saya meyakini dan Pak Menteri sudah menangkap bahwa memang ada suasana kebatinan dan keinginan teman-teman Komisi VII untuk mendalami terkait mengenai penggunaan anggaran 2022, jadi saya pikir itu bisa nanti di masing-masing dirjen saja saya analisis seperti itu biar lebih fokus diskusinya Pak Menteri, itu satu.

Lalu yang kedua, kurang lebih 1 bulan ini Pak Menteri, memang ya isu besarnya adalah meningkatnya harga komoditas internasional yang naik, akhirnya berimplikasi terhadap situasi domestik negara kita. Komoditas ini saya anggap seluruh produk komoditi tidak hanya sekedar baik itu di luar energi maupun di dalam energi kita artinya ini memberikan implikasi yang cukup besar terhadap beberapa aksi-aksi korporasi baik itu BUMN maupun yang swasta.

Yang terbaru, saya mendapatkan aspirasi terkait mengenai Semen Indonesia, itu juga hampir mirip isunya, narasinya sama dengan PLN, sama dengan Pupuk Indonesia dan terakhir juga tanpa kita mengurangi ini juga dari Pertamina juga cukup lumayan *suffer* juga dengan naiknya harga komoditi ini artinya praktis seluruh sektor yang kita anggap cukup strategis itu berkeluh kesah dan saya pikir ini hal-hal yang wajar saja dengan keadaan seperti ini karena *survivalitas* itu dibutuhkan.

Nah, melihat kondisi itu yang terbaru ini Semen Indonesia, contoh kayak misalnya PLN, kayak pupuk ataupun Pertamina, masing-masing mungkin punya argumentasi dan rasionalisasi bahwa di ujungnya mereka dibebankan penugasan memberi atau melakukan subsidi artinya di hulu juga mereka berharap bisa mendapatkan supporting baik itu subsidi ataupun apapun lah bentuknya itu bisa berupa DMO, bisa berupa DPO, daftar dapat.

Dulu yang namanya DPO ini Pak Menteri ini ditakuti orang, sekarang orang berebut untuk menjadi, untuk menjadi DPO, mendapatkan DPO. Kalau saya sih bilang saya nggak mau jadi DPO (Daftar Pencarian Orang) jadi sekarang ini orang berebut untuk mendapatkan DPO yaitu (*Domestik Price Obligation*).

Nah ini yang terbaru ini semen, memang semen ini cukup menarik untuk kita kaji bersama bahwa di hilirnya mereka tidak diberikan penugasan subsidi, kan seperti itu namun faktanya hampir seluruh objek-objek vital, objek-objek strategis butuh semen, saya pikir begitu. Jadi ini juga suka ataupun tidak suka memang perlu menjadi perhatian termasuk juga Pertamina.

Terakhir kita melihat walaupun mungkin memang Bu Nicke ini tidak berani menyampaikan secara langsung tapi kan tersirat bahwa memang perlu ada perhatian khusus juga terhadap Pertamina. Jadi saya bukan terhadap Bu Nickenya Bu, kalau Bu Nickenya saya setiap hari memberikan perhatian khusus Pak, Pak Menteri tapi maksudnya terhadap institusinya. Jadi artinya ada sebuah situasi yang memang cukup holistik yang terjadi hampir di seluruh korporasi BUMN kita baik itu juga yang di swasta.

Nah, pada kesempatan kali ini saya melihat Pak Menteri, pada akhirnya kita memang Kementerian ESDM tentunya sudah melakukan langkah-langkah

solusi jangka pendek, apa itu solusi jangka pendeknya, seperti yang dilakukan oleh Pak Ridwan Djamaluddin berubah menjadi Pangkopkamtib. Kalau istilah saya itu jadi Satpol PP-nya Kementerian ESDM sekarang, jadi setiap hari kerjanya sibuk nelponin semua perusahaan, semua perusahaan batubara untuk segera realisasikan DMO.

Pertanyaan saya kalau misalnya Dirjen Minerbanya bukan Pak Ridwan, ini gimana? Kalau misalnya menterinya bukan Pak Arifin Tasrif lagi, nanti berarti periode selanjutnya, ini gimana? karena pasti karena ini kebijakan-kebijakan sifatnya subjektif tergantung dari pejabat-pejabat Eselon I nya di masing-masing Kementerian, artinya apa? Dari awal kita mendorong seperti yang sudah kita sepakati yaitu entitas khusus tersebut yang memang beberapa waktu yang lalu sudah kita sepakati.

Silakan mau diperdebatkan seperti apa pun pada akhirnya memang kita melihatnya ini udah panjang kita dari kemarin kita *exercise*, kita diskusi tersebut, kita diskusi terus solusi jangka panjangnya yang harus segera adalah direalisasikan pembentukan identitas khusus tersebut, kalau memang ini mau segera beres karena kalau tidak, kita akan terus berdebat, akan terus ribut, akan terus bermasalah dengan yang namanya DMO dan harga, harga market global ini plus lagi sekarang ada namanya DPO, di tambah lagi sekarang DMO itu jadi DPO double Pak, *domestic PLN obligation dan domestic price obligation*. Jadi akhirnya semrawut, semuanya penuh dengan berbagai macam-macam argumentasi, yang swasta bilang pokok kita begini juga nggak ada. Makanya dari kemarin saya bilang yang namanya DMO itu kewajiban bagi semua perusahaan tambang, itu kita harus setuju dulu, nah artinya kalau selama ini kita menganggap DMO itu dilihat dari pendekatan *volume* yaitu bahwa 25% itu dilihat dari *volume*, harus sudah mulai di-*review* bukan hanya *volume* yaitu dari *revenue*.

Jadi kalau bagi mereka yang speknya tidak sesuai dengan yang mungkin tidak dibutuhkan, iya dia harus bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini yaitu di konversi tidak harus dengan *volume* tapi yaitu dengan *revenue*, karena ini kita butuh apa semangat gotong royong di antara kita semua, artinya apa? Apa yang sudah menjadi produk keputusan politik hasil dari rekomendasi Komisi VII bersama-sama dengan Kementerian ESDM yaitu menyepakati dibentuknya entitas khusus bla-bla tadi, menurut saya harus segera terealisasi Pak Menteri. Ini urgensinya karena kalau *ones* ini masuk *plek* dibentuk, kita enak pak menyelesaikan kayak misalnya Semen Indonesia, kita enak misalnya kita bicara mengenai suplai pasokan batubara untuk kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor yang lainnya, nggak perlu lagi Pak Ridwan Djamaluddin jadi kayak Satpol PP Pak haha begini, haha begini, begini, iya orang akhirnya kan, iya kalau Pak Ridwan dalam kondisi gimana lama-lama kan capek juga kalau tiap hari jadi Satpol PP tapi kita ingin menyelesaikan permasalahan yang secara holistik dan jangka panjang.

Nah apa yang tadi saya paparkan tadi Pak, saya hanya ingin ini kita interaktif saja Pak, saya butuh tadi juga udah banyak di-*sounding* oleh teman-teman, *update* status terakhir terkait entitas khusus ini seperti apa? Yang saya

dengarkan ada 2 konsep bagaimana itu saya mungkin butuh ada itu saja Pak. Saya pikir itu saja interaktif satu hal itu dulu Pak Menteri, terima kasih.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Baik terima kasih Pak Maman, Pimpinan Komisi VII.

Jadi memang entitas khusus ini tetap dalam progres untuk bisa dibakukan, iya dilembagakan dan targetnya bulan Juni. Jadi itu nanti kordinasinya dibawah Marinves dan target bulan Juni dan ini tentunya ini akan melibatkan asosiasi. Nah, asosiasi sendiri kan ada yang anggota dan non-anggota, ini adalah tugasnya dari Kadin, iya untuk bisa mengumpulkan seluruh, seluruh anggota itu dan mereka ini nanti akan ada, ada beberapa program skema yang akan dilakukan tapi pada intinya adalah nanti penugasan itu diberikan kepada beberapa penambang-penambang yang besar, ya. Nah, selisih harganya itu akan ditanggung melalui iuran, nah jumlah iurannya tergantung daripada kapasitas dan spesifikasi perusahaannya. Jadi ini mudah-mudahan ini bulan Juni, nah kita sedang menunggu rapat-rapat lanjutan, proses sedang berlangsung karena untuk bisa membentuk ini, membutuhkan data yang dan juga untuk perlu *men-collect* semua komunitas pertambangan batubara, iya tapi intinya, DMO ini dan DPO ini akan dijalankan sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya.

**F-PG/WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):**

Nah yang kedua Pak, izin Pimpinan, boleh ya Pimpinan biar kita ini.

Saya sempet mendengar ada wacana, sudah ada wacana bahwa akan yang satu dibuat konsep BLU yang baru, lalu yang kedua dibuat BLU berdasarkan lembaga yang sudah ada di Kementerian ESDM yaitu ada kemungkinan yaitu Tekmira, nah ini, ini wacana yang beredar. Kalau memang apa bisa Pak Menteri didorong saja memang lembaga yang sudah ada artinya ada pemanfaatan kelembagaan di bawah Kementerian ESDM yang menurut kita bisa lebih dioptimalkan. *Man power*-nya sudah ada, remunerasi nya tentunya sudah ada, pejabat-pejabatnya sudah ada, tinggal mungkin diselipkan dan ditambahkan wewenangnya saja, itu kalau memang karena begini Pak Menteri, tentunya dari segi efisiensi waktu akan jauh lebih efektif dan efisien kalau misalnya lembaga Institusi ini yang sudah ada dan pejabatnya pun sudah ada dan saya dengar juga namanya juga BLU juga artinya saya nggak tahu ah seperti apa secara status secara hukum, saya pikir itu kan ranahnya teman-teman di Kementerian ESDM. Tapi poinnya yang saya lihat kalau memang betul-betul sudah kearah situ, lebih baik yang dioptimalkan dimanfaatkan adalah institusi yang sudah ada, kenapa?

Sekali lagi Pak Menteri, ini nanti kita ini dan luar biasa aspirasi masuk ke kita kemarin ternyata juga cukup keras perdebatannya di dalam Komisi VII terkait mengenai isu Semen Indonesia. Makanya kita melihat apabila institusi ini cepat segera terealisasi, terbentuk, tentunya juga bisa segera menyelesaikan juga beberapa isu yang ada di beberapa sektor tersebut. Jadi

pada kesempatan kali ini mungkin itu tadi yang mau saya tanya itu kira-kira gimana tadi Pak Menteri? terima kasih silakan.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Iya saat ini sedang dikaji mengenai plus minusnya, iya mudah-mudahan kajian ini bisa segera diselesaikan, kan masing-masing juga ada, ada plus dan minusnya juga, ini melibatkan juga daripada para pelaku industri-industri yang terlibat di dalamnya.

**F-PG/WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):**

Terakhir, hanya ingin memberikan penguatan secara politik kepada Kementerian ESDM, kalau saya itu gampang aja, jadi kalau misalnya masih ada mungkin yang *a-e-o*, *a-e-o* Pak, pelaku-pelaku usaha yang mungkin agak sedikit kesannya merasa terbebani, saya pikir ya silakan saja informasikan kepada kami Komisi VII Pak, biar kita yang *bredeh*-nya karena kan kita bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk membicarakan kepentingan jangka panjang; jangan sampai Pak Ridwan lagi sendirian Pak yang nekan-nekan jadi kayak Satpol PP gitu, kasihan juga beliau kan jadi kita ingin agar ada sebuah solusi jangka panjang, prinsipnya seperti itu Pak Menteri dan segera terealisasi apa yang memang menjadi harapan kita. Itu saja Pimpinan, lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf.

*Wabillahi taufik walhidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Maman luar biasa, cerah sekali hari ini Pak Maman ya? Itulah, iya dilanjutkan Pimpinan yang lain Pak Eddy Suparno.

Dipersilakan yang terhormat.

**F-PAN (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H.) :**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan,  
Para Anggota,  
Pak menteri dengan segenap jajaran.

Saya singkat saja Pak Menteri karena tadi banyak sudah disampaikan juga oleh sesama rekan di Komisi VII, pertama saya mengambil pertanyaan saya dari *slide* 10 dan 11 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri.

Pertama mengenai peningkatan pengawasan penindakan penyalahgunaan BBM serta maksimalisasi fungsi digitalisasi SPBU. Iya memang pada saat kita kunjungan Pak Menteri Ke Makasar tadi disampaikan Ibu Andi Yuliandi Paris, itu memang kita lihat, kita datang ke SPBU dan ada beberapa kendaraan yang mengisi apa BBM dan yang di isi itu pertalite memang. Banyak, yang kami tanyakan ini dari Institusi mana? Dari kantor atau perorangan? Mereka mengatakan, oh saya dari BUMN, wah kok BUMN ngisinya pertalite gituloh. Nah jadi saya pikir ini salah satu contoh yang ada di lapangan di mana pertalite iya memang digunakan secara masif meskipun sesungguhnya mereka mempunyai kemampuan untuk tidak menggunakan Pertalite, jadi ini mungkin satu masukan, Pak.

Kedua, tadi Bapak mengatakan ada rencana peningkatan BBM solar akan meningkat 2,3 juta kiloliter ditambah juga pertalite hampir 5,5 juta kilo liter. Kami rasa memang dengan adanya kebutuhan sekarang ini di lapangan memang diperlukan tetapi iya memang Pak ujung-ujungnya anggarannya itu Pak, dananya itu memang kan membutuhkan anggaran, nah uangnya dari mana? Itu, itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya. Mungkin Bapak bisa memberikan karena memang jawaban akhir ada di pihak Kementerian yang lain.

Berikutnya juga mengenai peningkatan cadangan operasional menjadi 30 hari dan manajemen stok jangka panjang, iya kalau memang itu nanti kembali lagi menjadi beban Pertamina, saya kasihan sama Ibu Nicke dan yang lain-lain Pak Menteri karena saat ini hanya dengan 21 hari *cashflow*-nya sudah terangkap 5 miliar dolar, cukup besar dan apalagi nanti ke depannya menjadi 30 hari.

Mungkin juga yang perlu di dalam hal kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, iya pada saat nanti Pak Menteri bisa berbicara dengan Menteri Keuangan, iya mungkin bisa disampaikan Pak Menteri bahwa Pertamina perlu diberikan kompensasinya paling tidak sebagian. Tadikan sempat bicara ada, ada kiat dari Pak Asman, Pak Menteri bagaimana menyampaikan ke Ibu Menteri Keuangan, ya.

Berikut tadi juga disampaikan Ibu Diah penyesuaian harga pertalite dan minyak solar, nah ini walaupun ada penyesuaian kira-kira kapan? Dan iya *range*-nya berapa Pak, karena memang ini masih berakibat berdampak kepada masyarakat yang memang menggunakan itu dan masih berdampak pada aspek-aspek yang sekarang terjadi akibat Covid-19.

Berikutnya Pak Menteri mengenai LPG, subsidi menjadi subsidi langsung, ini kan sudah wacananya, sudah berlangsung cukup lama walaupun ini akan ada realisasinya, kira-kira kapan dan bagaimana rencananya? Ini sudah, saya kira mungkin sudah 1,5 tahun kita bicarakan dan berikutnya mengenai substitusi DME. Nah ini, DME ini masih visibel nggak Pak Menteri? Dengan, dengan pertimbangan bahwa secara teknis pembelian batu bara nya itu di *pack* di harga tertentu kurang lebih 15,8 US dolar dan ternyata yang digunakan bukan batubara dalam tanda petik batu bara yang kadar rendah, batubara sampah tetapi batubara yang lumayan yang kadarnya 4.200, nah ini

apakah secara *economical* masih visibel untuk dijadikan salah satu alternatif jangka menengah untuk mengganti LPG yang ada.

Kemudian rencana ini pak, tarif *adjustment* untuk listrik, tarif *adjustment* listrik pada tahun 2022, nah kira-kira bagaimana rencananya Pak, dan berapa *adjustment* yang akan di ditargetkan dalam hal ini.

Terakhir Pak, mengenai percepatan pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar untuk *transport*, saya melihat bahwa hidrogen ini memang sangat berpotensi Pak kedepannya karena ini kan bahan bakar yang memang bersih Pak ya, tetapi beberapa waktu yang lalu kita lihat bahwa Pertamina ini mohon maaf PLN, dalam hal ini PLN dengan banyaknya kapasitas yang akan masuk ke pasar dalam beberapa tahun ke depan ada 7 giga watt kalau nggak salah, nah itu terkendala, terkendala apa namanya *demand*, apakah bisa *demand* itu diciptakan Pak, diciptakan dalam bentuk seperti ini? Mungkin Pak Rida, Pak Dadan bisa memberikan masukan juga. Kita kan punya PLTA Pak, PLTA ada Saguling, Cirata, apakah itu tidak bisa dimanfaatkan sebagai iya produsen untuk hidrogen sehingga kapasitas yang ada itu sekarang bisa hilang, iya sebagai dan diganti oleh hidrogen dan itu mengurangi kapasitas yang nanti akan datang, *on stream* yang 7 giga watt itu.

Mungkin itu Pak masukan dari kami dan pertanyaan kami, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Saya kira cukup ya ini sudah juga cukup waktu dan sebelum dijawab beberapa hal dari pertanyaan dan pendalaman dari Komisi VII, anggota komisi yang terhormat kita perpanjang dulu waktunya kurang lebih 15 menit, jadi kita selesai persis tepat pukul 14 lewat 5 menit, begitu?

#### **(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah Bapak Menteri dan segenap jajarannya, dipersilahkan untuk menjawab berbagai tadi yang telah ditanyakan oleh anggota yang terhormat Komisi VII dan juga pimpinan, dipersilakan Pak Menteri.

#### **MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Baik terima kasih Bapak Pimpinan;  
Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Terima kasih atas masukan dan pertanyaan, saya akan meresponnya dan sebagainya nanti mungkin akan di lengkapi dengan yang tertulis secara lengkap. Yang pertama mungkin terkait dengan isu situasi minyak global yang tentu saja nanti ini berkaitan dengan BBM. Memang 3 langkah yang akan kita lakukan itu antara lain pemenuhan, iya kita mencoba untuk memenuhi

kebutuhan suplai lokal, iya untuk itu memang kita perlu menyiapkan cadangan-cadangan yang memang kita perkirakan akan kita perlukan. Untuk itulah maka tadi kita sampaikan bahwa kita akan melakukan usulan iya untuk bisa dilakukan tambahan kuota.

Yang kemudian kita juga melihat bahwa situasi konflik geopolitik ini mungkin berlangsung akan lama dan memang akibat daripada embargo, iya yang dilakukan oleh negara-negara tertentu, iya ini menyebabkan akan berkurangnya suplai. Nah suplai ini yang kurang lebih 10% dari suplai dunia itu, itu sudah direspon bahwa OPEC tidak mungkin bisa memenuhi.

Jadi kalau konflik ini berkepanjangan, iya ini juga akan menyebabkan, menyebabkan krisis suplai dan kalau krisis suplai ini akan menyebabkan pengaruh terhadap harga komoditas, iya karena memang *demand* sudah mulai meningkat pasca mulai membaiknya Covid ini sendiri dan *demand* meningkat kemudian suplai berkurang, nah ini yang akan menyebabkan untuk itu. Memang kita melakukan beberapa tadi, mencoba untuk bisa mencukupi kebutuhan lokal. Bagaimana jangka panjang atau pendek kita bisa nggak tingkatkan produksi-produksi hulu kita. Kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan efisiensi terhadap penyerapan BBM yang ada di dalam negeri, ya.

Jadi terkait BBM tadi, semua rata-rata Bapak/Ibu menyampaikan mengenai situasi yang terjadi di SPBU-SPBU. Jadi memang sebetulnya, kita itu sudah memiliki satu perangkat dan ini akan kita sosialisasikan, iya sebelum kita terapkan secara konsisten yaitu adanya Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini saya sampaikan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi pemerintah, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Nah Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 yang merupakan turunan Undang-undang Migas tahun 2001 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi itu juga menyampaikan hal yang sama bahwa setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun, dan denda, dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Jadi kami akan mensosialisasikan ini, iya jadi untuk pihak-pihak yang tidak mendapatkan haknya untuk berhati-hati agar klausul ini untuk tidak bisa diperlakukan. Ini terutama untuk para penampung-penampungan jasa-jasanya yang memang kegiatan komoditas usahanya adalah untuk perdagangan, apalagi perdagangan yang saat ini memang komoditasnya *booming*.

Nah kemudian, di sektor hulunya sendiri, iya kami tentu saja memikirkan perbaikan-perbaikan mengenai klausul-klausul perjanjian kerja antara Pemerintah dengan K3S dalam hal ini SKK Migas. Jadi kami akan melakukan juga perbaikan *term of condition*, iya untuk lelang blok migas baru, iya tentu saja ini akan butuh waktu lama tapi sekaranglah kita harus bisa menunjukkan

bahwa kita mempunyai *over* yang cukup kompetitif iya sehingga memang bisa mengundang investor untuk bisa masuk.

Kita masih memiliki potensi-potensi yang besar, iya kalau *fiscal term condition* kita ini bagus, kemudian kita bisa menyediakan data yang lebih lengkap, iya *Insha Allah* ini kita mereka juga akan tertarik. Jadi saya yakin ini akan jadi daya tarik tersendiri mengingat adanya konflik geopolitik yang saat ini juga melibatkan komoditas migas. Iya jadi kita akan mencoba untuk menawarkan split bagi hasil yang lebih baik, iya antara lain 50, 50 untuk wilayah kerja yang beresiko tinggi, kemudian menurunkan FTP, iya menjadi 10% dan *share able*, tidak ada minimum *signature* bonus fleksibilitas untuk memilih skema *gross split* maupun *cost recovery*, kemudian juga kita tawarkan DMO 100% ICP selama masa kontrak dan...(suara tidak jelas)...0% pada saat 3 tahun pertama, tidak ada *cost selling*, iya fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi dan eksploitasi sesuai ketentuan PP Nomor 27 dan PP 53 Tahun 2017 yang saat ini sudah dalam proses merevisi dan akan diharmonisasikan di Kemkumham, kemudian juga komersialisasi wilayah kerja dengan menggunakan sistem blok basis.

Juga saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam 2 bulan terakhir untuk mendapatkan insentif fiskal, hulu migas yaitu perbaikan ketentuan pajak tidak langsung, penyesuaian tarif PPH dan penerapan imbalan DMO sampai 100%. Nah kalau, sementara kita juga berharap bahwa revisi Undang-Undang Migas Ini bisa juga turut membantu memperbaiki iklim usaha migas kita, iya karena masukan-masukan dari para pelaku usaha migas yang saat ini, iya mereka menyampaikan ingin yang lebih simpel lagi *term conditionnya*, iya karena negara-negara lain juga menggunakan *term* yang lebih *simple*, iya contohnya sekarang semua kebanyakan negara menggunakan *tax and royalty mechanism* dan mereka juga berharap...(suara tidak jelas 2:59:17)...ini juga bisa di konsider kembali sebagaimana yang diberlakukan oleh kita sebelumnya, nah itu yang terkait dengan BBM.

Nah kemudian yang terkait dengan infrastruktur untuk daerah, tentu saja ini kita.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Izin interupsi Pimpinan. Berkaitan mengenai BBM mohon maaf Pak Menteri. Jadi saya ingin, tadikan Pak Menteri sudah menyampaikan, izin *it's okay?*

Iya jadi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan mengenai bahwasanya sebetulnya sudah ada peraturannya iya yang untuk di SPBU dan apa namanya akan dihukum sekian lama di penjara dan lain sebagainya. Nah, mungkin selepas dari apa itu disosialisasikan tetapi harus ada penindakannya Pak, karena di situkan sudah tertulis di setiap SPBU bahkan datanya sudah mencantumkan hingga plat nomor dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin itu sempet kita apa bahas cukup serius Pak, waktu kunjungan ke TPBM tersebut.

Nah, maka ada baiknya nanti ada tindakan yang khusus lah untuk hal-hal seperti itu agar tidak terjadi lagi, itu saja sih tambahannya, terima kasih.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Baik, memang yang kita temui di lapangan, adalah pemanfaatan jasa angkutan untuk mengangkut komoditas-komoditas komersial, komoditas-komoditas yang tidak subsidi dengan menggunakan BBM subsidi. Nah, yang akan nanti, yang akan kita bidik adalah para pemakai jasa ini, untuk itu mungkin ada yang belum mengetahui, iya bahwa adanya salah satu ada satu pasal di undang-undang kita yang memberikan sanksi, yang sebagaimana tadi saya sampaikan untuk itu kita melakukan sosialisasi lagi, iya supaya mereka paham dan pada saatnya nanti diberlakukan sudah tidak kaget lagi, sekalian juga untuk apa, untuk masyarakat.

Nah di lain sisi, memang sekarang kita sudah mulai menyiapkan perangkat digitalisasi untuk pengawasan SPBU kita. Iya jadi ada lebih dari 6 ribu SPBU di seluruh Indonesia, ini Pertamina sudah menyiapkan, tentu saja ini masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan, ya sebagaimana tadi disampaikan adanya truk yang bolak-balik. Nah itu bagaimana kita bisa menyetopnya ya, supaya tidak melakukan hal yang sama.

Nah, pertama mungkin iya itu sosialisasi aturan ini, iya sehingga, sehingga mereka masyarakat juga mengetahui persis, iya akibat daripada kalau terjadi penyalahgunaan.

Nah, di lain sisi selain digitalisasi juga perlu kita lengkapi infrastruktur logistik nya, jadi banyak sekali ya moda-moda transportasi yang ada di kepulauan kita contoh dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, iya kemudian Trans Sumatera, yang tentu saja membutuhkan. Kalau mereka nggak dapat barang, nggak dapat apa, BBM-nya, mereka pasti lari ke pengecer. Nah pertanyaannya pengecer itu dapat BBM dari mana. Nah ini juga perlu kita lakukan sosialisasi bersama, iya supaya paham betul.

Nah, kemudian juga yang terkait tadi bahwa untuk bisa melakukan program *Chemical and hunt oil recovery* memang membutuhkan suatu percobaan yang lama, iya diperlukan juga pengetesan-pengetesan kesesuaian mengenai formula, dan juga mengenai *cost-cost*-nya ini. nah kebanyakan para K3S kita yang sudah memilih dari apa? dari yang sudah memutuskan pindahan dari *cost recovery* ke *gross split* ini tentu saja memperhitungkan *cost-cost* mereka yang akan berdampak.

Nah ini memang nggak cepat tapi dengan naiknya harga komoditas minyak ini, mudah-mudahan bisa menjadi *driving* faktor bagi para K3S untuk bisa meningkatkan *output*-nya sepanjang kita bisa memberikan insentif yang lebih baik.

Kemudian tadi pertanyaan yang juga terkait dengan elektrifikasi, iya kami sependapat bahwa ke depannya memang kita harus mengukurnya berdasarkan per kapita. Iya memang karena target, target kenaikan konsumsi

listrik, ini harus bisa dilakukan perkapita. Nah, sekalian juga sekali bahwa dengan tadi Pak Wakil Ketua menyampaikan, juga bagaimana kita bisa men *create demand*? Nah, kita mencoba untuk bisa meng *create demand*. Nah salah satunya adalah bagaimana kita menarik investasi industri untuk masuk, iya untuk masuk ke Indonesia sehingga ini akan bisa meningkatkan *demand* listrik kita ya? Nah, untuk itu memang ketersediaan iya *supply* listrik yang andal, kemudian *competitiveness* kita, iya *competitiveness* kita untuk industri supaya memang industri ini menarik.

Kemudian keberadaan, banyak sekarang industri-industri ini ingin masuk jika kita bisa menyediakan energi hijau, energi bersih, iya untuk itu memang program, program untuk peningkatan pemakaian energi bersih ini harus kita banyak lakukan. Nah, contoh tadi Kalimantan Utara ada Hidro di sana, iya kita, kita berharap dalam 10 tahun ini bisa dilaksanakan, iya ada 10 gigawatt di sana. Kita juga sudah bikin perencanaan, bagaimana 10 giga watt itu bisa disalurkan, ini bisa disalurkan ke Sulawesi, iya untuk bisa mendukung industri-industri di sana menggunakan energi hijau sehingga produk-produk Indonesia ini di pasar internasional ini akan juga menjadi, menjadi laku ya, karena punya sertifikasi *green*, *green product* dan mudah-mudahan,

Nah, ini tentu saja memang perlu satu perlu satu proses, proses yang apa, proses yang cukup panjang dan membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak mungkin Pemerintah bisa melakukannya itu sendiri, untuk itu memang perlu peran dari pada para investor-investor itu yang memang harus kita rangkul dan kita berikan kemudahan-kemudahan dan juga *competitiveness* kita supaya mereka bisa masuk kedalam.

Kami tentu saja selalu memikirkan Indonesia Timur, iya Bu Mercy, iya pasti kita, pasti kita, pasti kita, pasti kita apa? pasti kita pikirkan karena memang 3T, daerah 3T ini memang perlu, perlu banyak sentuhan. Untuk itu memang dalam kesempatan nanti penyusunan untuk program anggaran tahun 2023, kami butuh dukungan *all out*, kami akan menyusun program. Iya menyusun program yang memang bisa menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur itu bisa kita lakukan dan untuk itu kita memerlukan dana yang anggaran yang lebih besar. Iya mungkin bisa diambil dari persentasi PNPB yang menjadi kontribusi daripada Kementerian ESDM, iya untuk bisa merealisasikan hal tersebut.

#### **F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak, Pak Ketua.

Bahwa informatori aja, kepada Pak Menteri konsentrasi kita dari 4 metode yang ada khusus untuk PLTD-PLTD pada metode dua yaitu untuk pengembangan grid dan relokasi PLTD, ini kan anggarannya tidak besar Pak, pengembangan grid dan relokasi, ini udah nggak beli baru lagi, kan karena pemindahan dari EBT-EBT yang sudah terpasang di daerah-daerah yang sudah basis listriknya kuat dan yang keempat itu yang pasang baru yang memang nggak ada pilihan.

Nah dari perencanaan yang ada yang sudah dikeluarkan dari kementerian cq. Dirjen Gatri khusus untuk metode yang keempat ini yang pasang baru ini, itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 PLTD, itu bukan PLTD yang besar-besar Pak, PLTD-PLTD kecil karena memang di pulau-pulau kecil, jadi harapannya kalau metode 2 dan metode 4 ini bisa terselesaikan, tanggung jawab saya untuk urusan PLTD yang di Maluku ini selesai ini urusan yang PLTD, kita udah bisa maju dengan yang lain-lain pak. Jadi mungkin itu semangatnya Pak Menteri, Pak Ketua.

Terima kasih.

### **MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Iya, iya nanti kami akan bicarakan dengan dengan PLN. Kemudian terkait dengan cadangan penyanggah energi, jadi memang CPE ini kalau kita tentukan terlalu besar memang membutuhkan dana yang besar, iya untuk itu memang perlu sedang dicari sekarang mekanisme mana yang memang kira-kira dia tidak akan terlalu membebankan *cost*, walaupun ada *cost*-nya itu tidak besar, iya tetapi bisa *mengcover* kebutuhan contohnya 30 hari, apabila kita perlukan. Iya mungkin dengan sistem, sistem apa ya Bu Nicke ya, *booking stock* dari, dari, dari apa, dari dari dari para pemilik barang yang memang bisa kita ambil pada saat kita perlukan.

Kemudian Simbara ini dapat diakses oleh perusahaan yang terdaftar dalam sistem modi ya, sehingga untuk menjual batu bara nya dalam negeri atau keluar negeri ini akan *input* datanya melalui Simbara, jadi memang bisa di akses.

Kembali lagi tadi mengenai kuota BBM, jadi nanti memang perhitungan angka kuota ini dipertimbangkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,25 % dan memang dasar daripada asumsinya itu nanti kita pasti akan apa, kita akan siapkan tapi data yang ada dari Januari sampai Maret itu menunjukkan pertumbuhan 10% untuk pertalite dan kemudian untuk solar, kemudian 14% untuk pertalite. Ini kita, kita dasar ini adalah kita pakai untuk bisa kita ekstrapolasi ke akhir tahun karena di akhir tahun ini diperkirakan di Oktober alokasi kuota kita tuh sudah habis, kalau kita tidak melakukan penambahan.

Mengenai DMO batubara tadi itulah saya sampaikan kepada Pak Maman tadi khususnya mengenai pertanyaan DMO batu bara, iya dengan adanya DMO batu bara ini ada jaminan supllai dan adanya DPO ini juga bisa menunjukkan bahwa *competitiveness* kita tuh bisa apa, bisa kita, bisa kita, bisa kita capai.

Kemudian untuk bisa mengatasi lagi jangka panjang kebutuhan energi kita kita, memang kita harus mempercepat masuknya energi baru terbarukan. Nah, untuk itu memang perlu, iya kita percepat ya program-program yang ada antara lain konversi dari BBM ke listrik, kemudian jaringan gas, kemudian juga DME, DME ini kalau kita lihat sekarang harga LPG yang hampir 900 dolar per

metrik ton, maka ini perbedaannya kurang lebih dengan DME yang diproduksi dalam negeri bisa lebih dari 200 dolar per metrik ton.

Nah ini, ini menurut kami selain juga bisa menjaga stok yang ada, juga pemanfaatan lokal konten bisa kita optimalkan, iya sehingga devisa kita itu tidak keluar. Mungkin ini benefit yang bisa kita apa, bisa kita peroleh.

Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian.

Mungkin garis besar ini yang dapat kami sampaikan kalau nanti hal-hal yang terkait dengan detailnya akan kami sampaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam, dalam jawaban, dalam bentuk tulisan.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Interupsi Pimpinan, sebentar mohon maaf.

Diah Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya Bu Diah.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Mohon maaf tadi saya keluar untuk Sholat, saya tidak tahu apakah pertanyaan saya sudah dijawab atau belum? Apa yang dimaksud dengan tadi melakukan perhitungan formula LPG 3 kg? Maksud saya begini Pimpinan, kalau pemahaman kita berbeda tentang apa yang dimaksud dengan formula 3 kg, yang dimaksud ESDM harga, yang dimaksud kita beda dan itu dilakukan dalam jangka pendek. Saya tidak mau tiba-tiba nanti muncul lagi di media sudah disepakati antara Komisi VII dengan DPR ternyata ada perubahan harga LPG 3 kg padahal kita nggak pernah bahas secara detail seperti itu.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Iya jadi mungkin begini, kita akan melihat perkembangan daripada konflik geopolitik ini, iya kalau perkembangannya berjalan terus bagaimana tadi yang kemungkinan terjadi, yang bisa terjadi misalnya kenaikan harga, harga minyak iya dunia dan dimana pada saat itu mungkin anggaran tidak, tidak mencukupi, iya mungkin tidak mencukupi, nah untuk itu memang perlu kita lakukan kalkulasi kembali, formulasikan kembali.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Iya maksudnya penyesuaian formula ini adalah penyesuaian harga?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Iya kira-kira, kira-kira demikian.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Iya maksudnya kalimat ini sumir Pimpinan ya, bahasa penyesuaian formula itu sumir gitu, bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi yang dimaksud tegas saja berarti dalam waktu dekat ESDM akan melakukan penyesuaian formula LPG, harga LPG 3 kg begitu?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Iya jadi begini Ibu Diah, iya jadi memang karena tadi disampaikan bahwa dengan kenaikan harga yang nonsubsidi yang 12 kg kemudian terjadi migrasi, iya sehingga memang dana subsidiya makin membesar, iya mungkin kita akan melakukan penyesuaian. Mudah-mudahan aja konflik bisa selesai, iya dan untuk itulah memang tadi, tadikan disampaikan masukan mengenai rencana kita untuk menambah Jargas 1 juta, sambungan rumah tangga. Ini intinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi impor kita ke LPG dan dengan, dengan gas itu iya kita bisa menekan biaya energi sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang kira-kira ekuivalen dengan harga LPG 3 kg.

Nah tadi saya sampaikan, kalau, kalau bisa di tahun 2023 ini nanti anggarannya itu bisa didukung untuk kita bisa merealisasikan bagaimana dari 40.000, bisa. Inikan kita kepingin Bu, iya ada kurang lebih 23 juta sambungan yang harus kita sambung untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan gas alam kita, karena gas alam kita yang tadi disampaikan punya potensi yang cukup besar.

**KETUA RAPAT:**

Iya intinya begini mungkin jalan tengahnya, apapun formula nanti dibahas lagi nanti di Komisi VII, kan begitu, bahwa ada sinyal, ada penyesuaian saya kira iya karena kita juga seperti tadi di APBN itukan gas subsidi kita sekarang yang dengan minyak 70 triliun itu dengan estimasi ICP 63 dan apa, Aramco, apa itu tadi adalah 565 kalau tidak saya salah ya?

**ANGGOTA KOMISI VII :**

890...(suara tidak jelas)...

**KETUA RAPAT:**

Sekarang, itukan sekarang.

Jadi dulu 500 sekian, jadi memang ada persoalan di situ bahwa itu gas itu adalah termasuk untuk yang subsidi, nah maka tadi menggaris bawahi apa kemungkinan akan tinjau kembali, akan disesuaikan apakah dari Pemerintah yang akan menambah subsidiya kan begitu, kalau memang tetap harga jualnya segitu tapi kalau tidak kan kalau tidak di *adjustment*, yang kena pasti yang ditugaskan Pertamina.

Jadi Bu Nicke puasa kan hari ini? Luar biasa Bu Nicke ini Pak, perhatian kepada Bu Nicke semuanya, Pimpinan semua juga perhatian sama Bu Nicke. Jadi jangan nangis Bu, pokoknya tetap kita bela bagaimana PLN, eh PLN tetap *survive* karena PLN sudah. Bayangkan PLN kalau kita tidak *fight* dengan DPO dan DMO, nah coba Darmo mana? Bisa jawab itu, apa yang terjadi gitu dan seterusnya, tapi intinya apa? Masyarakat harus kita selamatkan di tengah-tengah krisis ini, semuanya harus diselamatkan tapi balik lagi juga anggaran yang tersedia oleh dari negara juga perlu kita perhatikan. Saya itu Pak Menteri ya bahwa segala sesuatunya nanti akan juga dibahas di Komisi VII kalau toh terjadi penyesuaian kembali, kan begitu Pak Menteri.

Baiklah saya kira cukup ya, nanti akan dijawab secara tertulis hal-hal yang belum di apa, disampaikan oleh Pak Menteri, apa yang dipertanyakan dan di dalam oleh Anggota Komisi VII DPR RI.

Marilah Bapak/Ibu sekalian kita ada kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang segera kita bahas bersama agar menjadi kesimpulan rapat kita hari ini, segera di presentasikan Bapak/Ibu sekalian.

Baiklah, kesimpulan atau *draft* kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Rabu 13 April 2022.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memastikan realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan selanjutnya dapat lebih baik dan tetap memprioritaskan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.

Betul?

Saya kira ini sifatnya normatif dan menjadi, setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

2. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM Republik Indonesia untuk dapat proaktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat misalnya terkait dinamika kenaikan harga minyak dan di pasar global dan dampaknya terhadap harga BBM di dalam negeri.

Ini kayak menyetir perintah Presiden juga ini Pak Menteri? Proaktif Menteri, gitu? Setuju ya Bapak/Ibu sekalian ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

3. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM Republik Indonesia untuk dapat mempercepat pemanfaatan sumur minyak dan gas yang telah terbukti cadangannya karena melakukan eksplorasi baru bersifat *high cost* dan *high risk*.

Ini tadi kalau tidak salah dari Partai PKB, Pak Syaikhul Islam, coba bisa didalami Pak tentang ini? setuju? Setuju Pak Syaikhul ?

**(RAPAT : SETUJU)**

4. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM Republik Indonesia untuk dapat terus menjaga iklim investasi minyak dan gas yang baik demi meningkatkan *foreign direct investment* ke Indonesia dan sudah barang tentu seberapa menyangkut tentang cadangan atau mempertahankan *lifthing* minyak yang ditargetkan.

Ada tambahan mungkin itu ya, karena iklim investasi itu tidak sekedar *foreign direct investment* dalam pengertian, ini juga untuk tetap dalam cadangan, tapi prinsipnya setujulah poin 4 ini, Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT : SETUJU)**

5. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk terus meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan mendorong penindakan tegas terhadap perusahaan ataupun perorangan yang terbukti melakukan penimbunan BBM atau membeli BBM bersubsidi secara tidak tepat.

Setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

6. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM Republik Indonesia untuk segera merealisasikan pembayaran subsidi listrik dan BBM kepada BUMN terkait.

Ini maksudnya apa ini?

Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk segera, oh iya maaf salah. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk segera mendorong percepatan pembayaran kompensasi listrik dan BBM kepada BUMN terkait, maksudnya pastinya begitu, Bapak/Ibu sekalian? Kepada Menteri terkait atau kepada BUMN terkait?

Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk segera mendorong percepatan pembayaran kompensasi listrik dan BBM.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Bapak Ketua, izin.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Bagian ini nih, ini kordinasi antar menteri dengan Menteri Keuangan juga Pak.

**KETUA RAPAT:**

Lah iya makannya.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Berkaitan dengan masalah.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Kita, kita lakukan koordinasi dengan 3 Menteri, iya BUMN, Keuangan dan ESDM dan beberapa waktu yang lalu memang sudah disepakati ada beberapa, ada sejumlahnya yang akan disepakati.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Atau meminta Menteri ESDM untuk segera melakukan koordinasi.

**KETUA RAPAT:**

Iyalah.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Dengan Menteri Keuangan dan Menteri satu laginya apa.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

BUMN, BUMN.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

BUMN, iya.

**KETUA RAPAT:**

Iya Menteri BUMN, saya kira iya. Iya diperbaiki redaksinya saja, intinya adalah bahwa semua harus diselamatkan, yang pertama harus diselamatkan rakyat, yang kedua BUMN Berdasarkan kemampuan atau keuangan Pemerintah, kan begitu?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua sebelum masuk di poin 7 mungkin saya tambah satu poin baru berkaitan dengan kelistrikan, karena ini semuanya berkaitan dengan BBM.

**KETUA RAPAT:**

Oh begitu?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII):**

Coba poin 6 ya?

Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk segera melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN guna mendorong percepatan pembayaran kompensasi listrik dan BBM untuk BUMN terkait, iya oke?

Untuk BUMN terkait, iya oke untuk BUMN terkait, iya maksudnya PLN dan Pertamina ini ya?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Kenapa tidak sebut nama saja Pak, langsung kepada PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero?

**KETUA RAPAT:**

Kena kompensasi kan biar jelas.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Kompensasi hanya untuk 2 ini Pak Ketua begitu dari pada dia abu-abu begini.

**KETUA RAPAT:**

Ini Dirut PLN tidak hadir tapi disebut ini kan enak benar ini.

**ANGGOTA KOMISI VII :**

Waduh.  
Harus ada khusus ini.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Sama aja.

**KETUA RAPAT:**

Iya jadi secara eksplisit BUMN terkait adalah PT PLN Persero dan PT Pertamina Persero, begitu ya?

Setuju Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT : SETUJU)**

**F-PDIP ( H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.) :**

Nah yang ini sebelum Pimpinan, sebelum masuk ke poin 7 ini, ini seperti nggak tahu tempat atau tidak kita membahas disini ya? Rapat kemarin yang dipimpin oleh Pak Eddy Soeparno terkait dengan PT. Semen dengan PT. Pupuk, iya kan harus ada jaminan pasokan energi baik batu bara maupun gas yang melalui kita minta kepada Menteri ESDM untuk memberikan jaminan seperti itu Ketua, apakah bisa dimasukkan di sini atau dibahas nanti itu Ketua, yang penting ini udah ketemu Pak Menteri, udah ketemu Pak Dirjen gitu loh.

Iyakan ada Pak Dirjen Batubara, ada Pak Dirjen Migas, seperti itu. Terima kasih Pimpinan, Pak Karding, iya?

**KETUA RAPAT:**

Kok Pak Karding? Mana?

**F-PDIP ( H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.) :**

Nggak Pak Karding yang bawa pesennya tadi.

**KETUA RAPAT:**

Oh begitu, jadi betul bahkan tadi sebagaimana biasanya melalui dialog informasi. Sudah ada jalan keluarnya, jalan keluarnya kita kemukakan saja di sini menjadi Pak Menteri akan menyurati, betul, maaf pihak atau dijelaskan saja Pak Menteri, karena ini penting secara terbuka, apa yang menjadi kebutuhan baik tadi non-PLN tadi.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Iya kita memang sudah memberikan dan memberi mengeluarkan Kepmen terkait dengan alokasi DMO berikut *press* nya untuk non-PLN terutama untuk Semen, Pupuk dan industri lain kecuali *smelter*.

Udah ada Kepmennya.

**F-PDIP ( H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.) :**

Oke, terima kasih Pak Menteri, terus untuk memenuhi kebutuhan mereka, kan ada sisa 5% dari 30 yang Pak Ketua sampaikan itu.

**KETUA RAPAT:**

Betul.

**F-PDIP ( H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.) :**

25 untuk PLN, yang 5% katanya masih kurang itu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya jadi tadi ada semacam bukan kesepakatan ya, intinya adalah mekanismenya adalah silakan berkirim surat, baik itu semen maupun pupuk kepada Kementerian ESDM perihal tentang kebutuhan dia, nanti Menteri ESDM yang akan melakukan pendekatan kepada kewajiban-kewajiban DMO tadi, nah dengan berbagai ketentuannya apabila melanggar maka akan ada sanksi dan sebagainya, artinya apa? Ini Pak Gunhar luar biasa, iya lagi-lagi Komisi VII menjadi solusi. Jadi tadi sudah, itu betul sekali.

Jadi marilah datang ke Komisi VII karena fungsi keempatnya adalah fungsi *problem solving*, jadi sudah ada solusi tadi. Jadi aspek teknisnya nanti akan, akan ada, nanti akan ada FGD ulang, biar tata aturnya, tata kelolanya lebih jelas.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Ada di undang-undang.

**KETUA RAPAT:**

Mau dijelaskan Pak Menteri?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Ada Undang-Undang Minerba yang tahun 2020 lalu itu mengenai DMO dan *price*, nah itu pakai sebagai dasar.

**F-PDIP ( H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.) :**

Menteri terima kasih Pak Menteri.

**ANGGOTA KOMISI VII:**

Iya Pimpinan, Pimpinan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Pak Ketua, Pak Ketua.

Tadi saya pak ketua sebelum Pak Gunhar, iya.

Jadi mungkin saya usul ada satu poin baru sebelum, sesudah poin 6 berkaitan dengan masalah kelistrikan. Jadi Komisi VII DPR RI mendorong atau mendesak ya, saya lebih usul mendesak karena perencanaannya ini per 2022

mestinya sudah selesai atau masuk di dalam perencanaan 2023. Mendesak Menteri ESDM dan PT PLN Persero untuk menyelesaikan masalah kendala 97 PLTD di Maluku, Maluku Utara dan di wilayah-wilayah 3T lainnya.

**KETUA RAPAT:**

Apakah ini memang sebetulnya ini nanti juga, ini memang bersifat imperaktif politik tetapi nanti implementasi teknisnya pasti dengan PLN ini.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya tapi PLN juga menunggu kebijakan dari Menteri, keputusan nggak bisa diambil PLN Pak, hari ini. Jadi mestinya dia masuk dalam kebijakan baru *imperatif* kebijakannya keluar Pak dalam kebijakan anggaran dan lain-lain.

**KETUA RAPAT:**

Mendesak Menteri ESDM untuk menyelesaikan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Maluku dan Maluku Utara.

**KETUA RAPAT:**

Kendala PLTD.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Maluku.

**KETUA RAPAT:**

Ini secara khusus ya, Maluku dan?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Maluku, bukan Maluku Utara ya?

Maluku, Maluku Utara dan daerah 3T lainnya. Maluku, Maluku Utara dan daerah 3T lainnya, iya.

Poin ke 8, berkaitan dengan masalah program BLBP ya yang pasang baru itu Pak Ketua. Komisi VII DPR RI mendorong, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk segera melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan tahap kedua, ini apa ya bahasanya yang berkaitan dengan apa ya, *lock* membuka *automatically lock* anggaran itu apa istilahnya? Mendorong Menteri ESDM untuk segera melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan agar tahapan kedua penyelesaian program BLBP dapat segera dituntaskan ditahun 2022, jangan sampai muncul lagi di tahun 2023, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya intinya bulet 80.000 maksudnya begitu?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Iya.

Untuk segera melakukan koordinasi dengan Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Iya mungkin ini bagi yang belum *update* bahwa memang ada semacam rencana 2 tahap gitu, 40.000, 40.000, maksudnya ini Ibu Mercy agar dalam satu kebijakan untuk anggarannya itu 80.000 sekalian gitu maksudnya?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Mungkin dibahasakan langsung saja, untuk segera melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan agar 80.000 sambungan baru program BLBB dapat segera direalisasikan nanti teknisnya tahap satu, tahap 2, itu teknis. 80.000 tambah satu nol lagi.

Iya tuntas Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Bapak Pimpinan.

**F-PDIP ( H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.) :**

Pimpinan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar ini dari Pak Menteri, habis ini Pak, iya.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Apakah mengenai usulan perubahan kuota ini bisa dimasukkan dalam kesimpulan? BBM?

**KETUA RAPAT:**

Kuota BBM.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Itu yang penting.

**KETUA RAPAT:**

Oh iya, iya.

Justru betul, setuju karena memang ini kesimpulan kita juga beberapa waktu yang lalu ketika kita Rapat dengan ini kok, dengan Pertamina. Pertamina memang ingin tadi karena Bu Mercy waktu itu nangis juga minta-minta tambah, akhirnya di tambah dan, dan ini keluar di angka ini, artinya kita justru sangat *respect* bahwa ini ditindak lanjuti sebagai sebuah *policy*, semua karena memang tadi *demand* naik karena pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2 dan seterusnya maka volumenya pun kita tambah.

Coba dirumuskan Pak Eddy bahwa penambahan kuota juga masuk dalam.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Komisi VII DPR RI menyepakati bersama, menyepakati atau bersepakat atau apa ya? Iya menyepakati penambahan kuota BBM, BBM subsidi dan LPG, BBM subsidi, iya sesama Menteri ESDM.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Solar, pertalite dan mitan.

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Dengan Menteri ESDM dengan rincian, dengan rincian solar diusulkan 2,29 juta kiloliter, di usulkan bertambah 2,29 juta kiloliter, mitan 0,10 juta kiloliter dan pertalite 5,45 juta kiloliter, halaman 10.

**F-PDIP ( H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.) :**

Mungkin perlu tambahan masing-masing dengan rincian masing-masing pertalite sekian, solar sekian.

Izin Ketua izin, *sorry, sorry*.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Bertambah ya? Bertambah.

**ANGGOTA KOMISI VII :**

Pertamax juga ya?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Satuannya ditulis Mas, satuannya ditulis.

**KETUA RAPAT:**

Gitu Pak Menteri? Setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

**F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah, tadi ada dari Pak, oh sudah cukup? Ternyata memang ini adalah ada kontak batin antara Pak Mukhtarudin dengan Pak Menteri.

Baiklah, yang keenam, kesepuluh, ini saya sudah disorientasi ini dari tadi duduk terus sementara Maman mondar mandir.

Kesepuluh Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat 20 April. Setuju Pak Menteri ya? Paling lambat 20 April? Atau ada yang lain?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Nomor 8 ada salah *type error*, jadi harusnya BPBO bukan BLBP. BPBL, Bantuan perumahan.

**KETUA RAPAT:**

Bukan LBBP ya Pak?

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Bantuan Pemasangan Baru Listrik.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Tapi kalau BPLB bisa juga, Bantuan Pemasangan Listrik Baru.

**KETUA RAPAT:**

Yang penting bukan LBBP, Pak.

Iya itu.

Oke Bapak/Ibu sekalian, kita sungguh bersyukur hari ini kita melakukan rapat kerja, eh maaf tadi yang ke ini sanggup ya Pak ya? Tanggal 20 April jawaban tertulis? Saya ketok kembali.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baiklah Bapak/Ibu sekalian, sungguh bersyukur kita hari ini melakukan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dengan lancar, dengan sangat-sangat produktif, diskusi berkembang dengan sangat-sangat intens, semua adalah diabdikan bagi kepentingan rakyat kita.

Baiklah Bapak/Ibu sekalian, sebelum kita tutup Pak Menteri dipersilahkan untuk menyampaikan semacam *closing statement*.

Dipersilakan Pak Menteri.

**MENTERI ESDM (Ir. ARIFIN TASRIF) :**

Baik terima kasih Bapak-Bapak pimpinan;  
Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Terima kasih iya atas semua masukan, maupun pertanyaan yang tadi telah disampaikan yang merupakan masukan yang sangat produktif yang mudah-mudahan bisa kita tindaklanjuti dengan baik.

Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas semua masukan dan pertanyaan tadi dan semoga kita semua sehat-sehat saja, Aamiin.

*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta seluruh jajarannya, nih hari ini kita apresiasi betul lengkap semua hadir baik Eselon I juga ada Pertamina, ada juga PLN, meskipun hadir *virtual*, ada BPH Migas.

Jadi kita sangat-sangat komprehensif membahas persoalan energi kita hari ini dan berbagai masalah yang mengantarainya.

Baiklah Bapak/Ibu sekalian.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, saya nyatakan ditutup.

*Wabillahitaufiq walhidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.33 WIB)**

a.n. Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**Dra. Nanik Herry Murti**  
**NIP.196505061994032002**